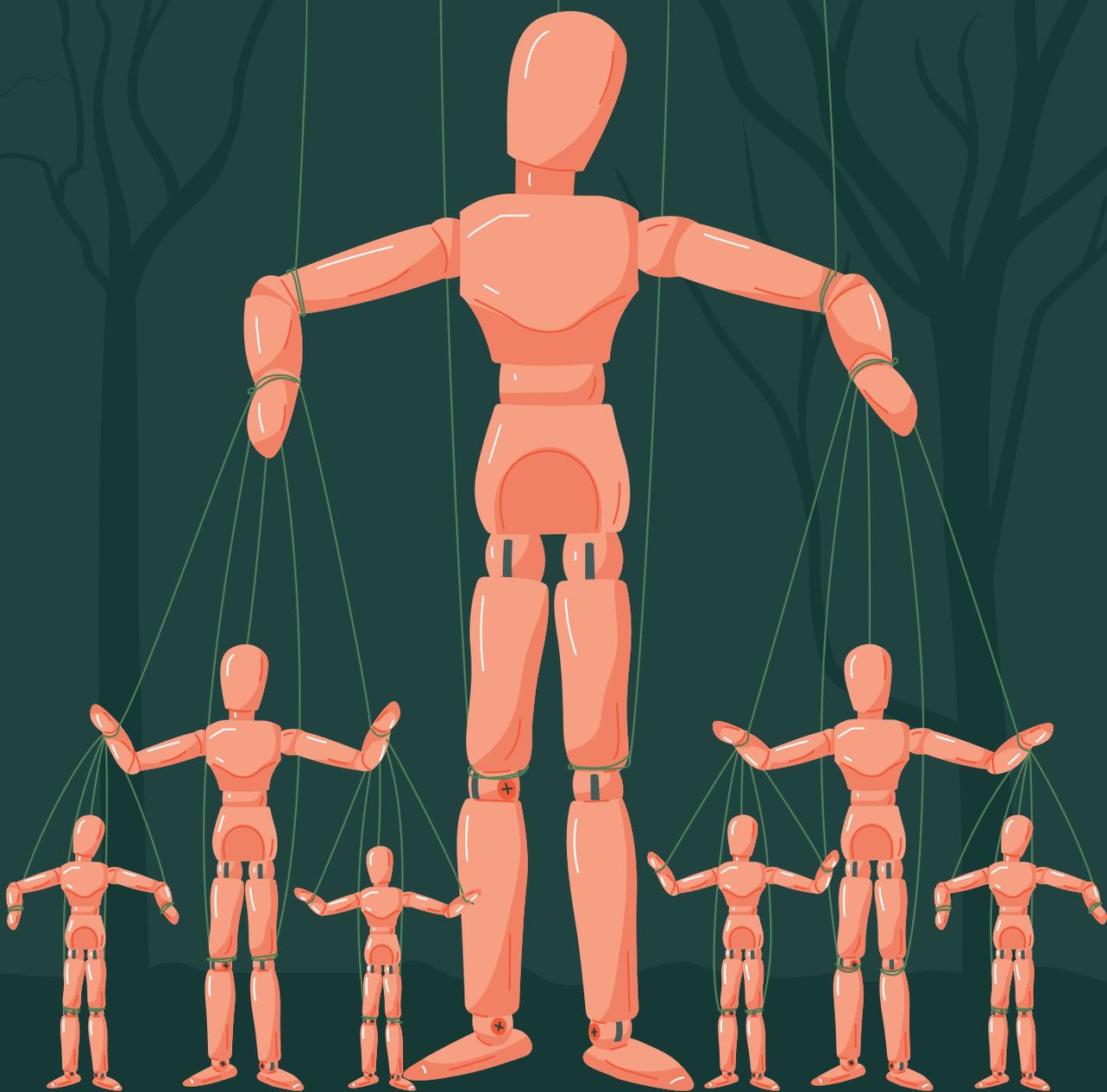


Laporan Hasil Analisis Jaringan Sosial

Aktor Sentral dalam Jaringan Oligarki Sumber Daya Alam: Berdasarkan Konteks Omnibus Law



GREENPEACE

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	3
1. Latar Belakang	4
2. Metodologi Penelitian	6
2.1 Ruang Lingkup Penelitian	6
2.2 Pengumpulan Data	8
2.3 Analisis Data	9
2.4 Tantangan Metodologis	10
3. Hasil Analisis dan Pembahasan	12
3.1 Analisis Jaringan Sosial (SNA) pada Sektor Tambang dan Energi	12
3.1.1 Atribut aktor dalam jaringan oligarki pada sektor tambang dan energi	13
3.1.2 Aktor yang terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi	15
3.1.3 Struktur relasional aktor dalam jaringan aktor pada sektor tambang dan energi	18
3.2 Analisis jaringan sosial (SNA) pada sektor perkebunan	26
3.2.1 Atribut aktor dalam jaringan oligarki pada sektor perkebunan	27
3.2.2 Aktor yang terafiliasi dengan perkebunan sawit dalam kawasan hutan	29
3.2.3 Struktur relasional aktor dalam jaringan aktor pada sektor perkebunan	33
3.3 Analisis jaringan sosial (SNA) dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)	41
3.3.1 Atribut aktor dalam jaringan oligarki dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam	41
3.3.2 Aktor yang terafiliasi dengan perusahaan tambang, energi, dan perkebunan sawit	44
3.3.3 Struktur relasional aktor dalam jaringan aktor pada pemanfaatan sumber daya alam	48
4. Kesimpulan	56
Referensi	57

Daftar Gambar

Gambar 1. Kategori aktor di sektor tambang dan energi berdasarkan keanggotaannya dalam partai	13
Gambar 2. Kategori aktor di sektor tambang dan energi berdasarkan jabatan fungsionalnya	14
Gambar 3. Proporsi kedudukan aktor di dalam perusahaan tambang dan energi	15
Gambar 4. Jaringan aktor dengan perusahaan tambang dan energi	17
Gambar 5. Aktor yang terhubung dengan aktor lain di perusahaan yang sama	17
Gambar 6. Sentralitas tingkatan dalam jaringan aktor di sektor tambang dan energi	19
Gambar 7. Sentralitas keperantaraan dalam jaringan aktor di sektor tambang dan energi	22
Gambar 8. Jaringan aktor dengan nilai tingkatan dan atau keperantaraan tertinggi pada sektor tambang dan energi	25
Gambar 9. Kategori aktor di sektor perkebunan sawit berdasarkan keanggotaannya dalam partai	27
Gambar 10. Kategori aktor di sektor perkebunan sawit berdasarkan jabatan fungsionalnya	27
Gambar 11. Proporsi kedudukan aktor dalam perusahaan perkebunan sawit	28
Gambar 12. Jaringan aktor dengan perkebunan sawit	29
Gambar 13. Aktor yang terhubung dengan aktor lain di perkebunan yang sama	32
Gambar 14. Sentralitas tingkatan jaringan aktor pada sektor perkebunan sawit	34
Gambar 15. Sentralitas keperantaraan jaringan aktor pada sektor perkebunan sawit	36
Gambar 16. Jaringan aktor dengan nilai tingkatan dan atau keperantaraan tertinggi pada sektor perkebunan sawit	38
Gambar 17. Kategori aktor dalam jaringan oligarki berdasarkan keanggotaannya dalam partai	42
Gambar 18. Kategori aktor dalam jaringan oligarki berdasarkan jabatan fungsionalnya	43
Gambar 19. Proporsi kedudukan aktor di dalam perusahaan di sektor SDA	43
Gambar 20. Jaringan aktor dengan perusahaan di sektor sumber daya alam	45
Gambar 21. Aktor yang terhubung dengan aktor lain di perusahaan yang sama di sektor SDA	47
Gambar 22. Sentralitas tingkatan dalam jaringan aktor pemanfaatan SDA	49
Gambar 23. Sentralitas keperantaraan dalam jaringan aktor pemanfaatan SDA	50
Gambar 24. Jaringan aktor dengan nilai tingkatan dan atau keperantaraan tertinggi pada pemanfaatan SDA	54

Daftar Tabel

Tabel 1. Aktor dengan nilai degree tertinggi dalam jaringan aktor dengan perusahaan	16
Tabel 2. Statistik deskriptif jaringan aktor pada sektor tambang dan energi	18
Tabel 3. Aktor dengan derajat tingkatan tertinggi dalam jaringan aktor di sektor tambang dan energi	20
Tabel 4. Aktor dengan derajat keperantaraan tertinggi dalam jaringan aktor	23
Tabel 5. Aktor dengan nilai degree tertinggi dalam jaringan relasi aktor dengan perusahaan	30
Tabel 6. Statistik deskriptif jaringan relasional aktor pada sektor perkebunan sawit	33
Tabel 7. Aktor dengan derajat tingkatan tertinggi dalam jaringan aktor di sektor perkebunan sawit	35
Tabel 8. Aktor dengan derajat keperantaraan tertinggi dalam jaringan aktor di sektor tambang dan energi	37
Tabel 9. Aktor dengan nilai degree tertinggi dalam jaringan relasi aktor dengan perusahaan	46
Tabel 10. Statistik deskriptif jaringan relasional aktor pada pemanfaatan sumber daya alam	48
Tabel 11. Aktor dengan derajat tingkatan tertinggi dalam jaringan aktor pemanfaatan SDA	51
Tabel 12. Aktor dengan derajat keperantaraan tertinggi dalam jaringan aktor pemanfaatan SDA	53

01.

Latar Belakang

Kondisi ekonomi politik di Indonesia dewasa ini menunjukkan adanya distorsi domain negara dengan domain swasta. Retorika tentang “*pelayanan negara*” mengandaikan bahwa *Politically Exposed Persons* (PEP) akan bertindak dalam kepentingan publik luas, meski dalam kenyataannya perilaku mereka secara empiris lebih dapat dijelaskan lewat motif-motif kepentingan pribadi yang lebih sempit. PEP adalah istilah yang merujuk pada individu yang dipercaya memegang jabatan publik. Pengalaman empirik di negara berkembang menunjukkan bahwa motivasi utama para pengusaha atau ‘taipan’ berpolitik untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya [1]. Relasi kekuasaan di antara aktor yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik untuk kepentingan dirinya sendiri disebut sebagai oligarki [2]. Hal yang penting dari pengertian tersebut, oligarki dipahami dalam bentuk relasi kekuasaan dari koalisi *politico-business* yang cair di Indonesia yang memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya publik.

Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) merupakan salah satu peraturan sah yang diproduksi oleh jaringan oligarki yang prosesnya tidak membuka arus demokrasi dari masyarakat. Omnibus Law juga memberikan ruang bagi korporasi besar untuk mengeluarkan kebijakan dan regulasi dengan izin pemerintah pusat terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di semua lini. Omnibus Law yang berorientasi pada investasi akan mendorong kekuatan korporasi yang mendominasi di Indonesia [3]. Proses perumusan hingga disahkannya Omnibus Law ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi aktor-aktor yang ada di dalam jaringan oligarki. Berbagai aktor saling terhubung satu sama lain dalam berbagai konteks untuk menghasilkan peraturan ini. Analisis jaringan sosial (SNA) menawarkan cara untuk mengungkap relasi kekuasaan tersebut melalui kerangka analitis yang berakar pada teori grafik. Analisis jaringan menganalisis sifat struktural jaringan dengan memetakan hubungan timbal balik antar aktor. SNA memahami sistem sosial sebagai struktur yang dibangun oleh hubungan atau ikatan antara aktor [4]. Ikatan itu sendiri sifatnya sangat bervariasi dan dapat dibentuk melalui hubungan kekerabatan, pekerjaan, komunitas, afiliasi dan sebagainya.



© Rivan Hanggara / Greenpeace

Aktivis Greenpeace Indonesia memasang instalasi “monster oligarki” raksasa, pada aksi protes di depan gedung DPR RI di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan aksi damai yang dilakukan Greenpeace, menandai satu tahun sejak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang bermasalah. 05 Oktober 2021. 6°12'27.65"S, 106°48'11.31"E.



© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Beragam tulisan dan simbol yang melekat pada monster gurita ini menunjukkan bagaimana oligarki masuk di berbagai dimensi dan aspek kehidupan masyarakat, termasuk energi, pertanian, kebebasan berpendapat, kehidupan masyarakat adat, serta melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 05 Oktober 2021. 6°12'27.65"S, 106°48'11.31"E.

02.

Metodologi Penelitian

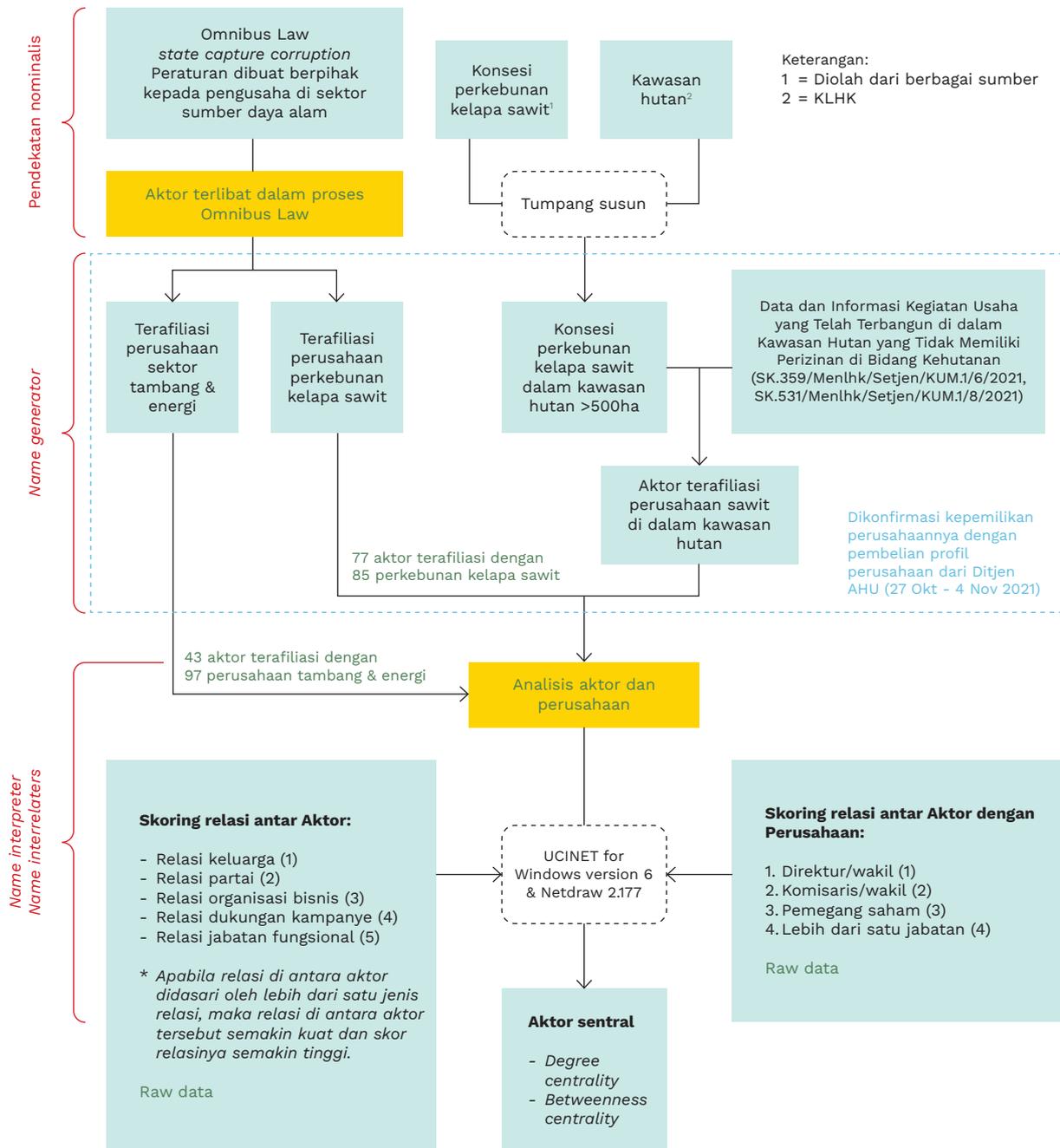
2.1 Ruang Lingkup Penelitian

Salah satu kesulitan dari studi jaringan adalah penelitian jaringan tidak memiliki batas sampel yang tegas, sehingga peneliti perlu membuat pembatasan yang spesifik untuk menentukan jaringan mana dari aktor yang akan dimasukkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan nominalis untuk membatasi jaringan, yang mana jaringan dan definisinya dibentuk berdasarkan tujuan dan kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti [5].

Penelitian ini melihat bahwa Omnibus Law merupakan salah satu bentuk *state capture* yang dilakukan oleh jaringan aktor yang terlibat di dalamnya. Beberapa pasal pada peraturan ini mencerminkan keberpihakan kepada para pengusaha di sektor sumber daya alam seperti sektor tambang, energi, dan usaha-usaha yang berada di dalam kawasan hutan. Relasi diantara para aktor yang terlibat langsung dalam proses perumusan dan pengesahan Omnibus Law termasuk pengusaha yang terafiliasi dengan

perusahaan di sektor SDA akan memperoleh manfaat dari peraturan ini. Oleh karena itu, penelitian ini fokus kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam proses Omnibus Law sekaligus aktor yang terafiliasi dengan perusahaan di sektor tambang dan energi serta aktor yang terafiliasi dengan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Penelitian ini berangkat dari laporan mengenai Omnibus Law yang dipublikasikan oleh koalisi Bersihkan Indonesia [6], Surat Keputusan Nomor SK.359 /Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2021, dan Surat Keputusan Nomor SK.531/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan. Daftar nama aktor dari sumber-sumber tersebut kemudian dikonfirmasi lebih lanjut melalui beberapa tahapan pengumpulan data sehingga menghasilkan jaringan aktor yang dianalisis dalam penelitian ini.

Alur Penelitian Analisis Jaringan Sosial (SNA)



2.2 Pengumpulan Data

Salah satu kelebihan dari analisis jaringan sosial, yaitu dimungkinkan menggunakan teknik pengumpulan data dengan *desk study* [7]. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan organisasi, peraturan pemerintah, informasi publik paling *update* dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)¹, publikasi ilmiah, dan berita media elektronik. Penelitian jaringan fokus pada pertanyaan mengenai aktor dan relasi diantara aktor. Secara umum, pertanyaan mengenai jaringan bisa dibagi ke dalam tiga bagian yaitu *name generator*, *name interpreter*, dan *name interrelaters*. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dalam beberapa tahapan.

Pertama, tahap awal identifikasi aktor mengacu pada laporan yang berkaitan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan dan pengesahan Omnibus Law (UUCK) dan Surat Keputusan KLHK mengenai perkebunan sawit dalam kawasan hutan ditumpangsusunkan dengan perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang dianalisis oleh Greenpeace dan Treemap kemudian diseleksi yang luasnya diatas 500 hektar. Berdasarkan dua sumber tersebut, peneliti membuat daftar aktor dan perusahaan yang terafiliasi dengan aktor-aktor (*name generator*). **Kedua**, mengonfirmasi kedudukan aktor dalam perusahaan yang terafiliasi dengan aktor tersebut melalui Ditjen AHU. Apabila informasi dari Ditjen AHU menunjukkan bahwa seorang aktor dikonfirmasi tidak memiliki kedudukan dalam suatu perusahaan atau profil suatu perusahaan tidak ditemukan di AHU, maka perusahaan tersebut tidak masuk dalam analisis studi ini.

Ketiga, ketika peneliti sudah mendapatkan nama anggota dalam jaringan, peneliti mencari informasi mengenai bentuk, jenis, dan intensitas

hubungan dari masing-masing aktor dan perusahaan (*name interpreter*). Selain itu, peneliti mencari informasi mengenai berbagai atribut aktor untuk mengelompokkan aktor-aktor kedalam beberapa kategori seperti afiliasi partai dan jabatan publik. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan organisasi, publikasi ilmiah, dan berita elektronik.

Keempat, menggambarkan seluruh hubungan diantara aktor dengan perusahaan dan aktor dengan aktor lainnya menggunakan skala ordinal (*name interrelaters*). Peneliti membuat beberapa kategori untuk menentukan tingkatan hubungan diantara aktor dengan perusahaan, yaitu: 1) Skor satu untuk aktor yang menjabat sebagai direktur/wakil direktur; 2) Skor dua untuk aktor yang menjabat sebagai komisaris/wakil komisaris; 3) Skor tiga untuk aktor yang menjabat sebagai pemegang saham; dan 4) Skor empat untuk aktor yang memiliki lebih dari satu jabatan, seperti pemegang saham sekaligus komisaris.

Pada jaringan, relasional antar aktor peneliti menentukan beberapa kategori relasi yaitu: 1) Relasi keluarga; 2) Relasi dalam partai, relasi antar aktor di suatu perusahaan tertentu; 3) Relasi antar aktor di dalam organisasi bisnis (KADIN, HIPMI, APINDO); 4) Relasi dalam memberikan dukungan kepada cawapres/ Tim Kampanye Nasional ketika Pilpres; dan 5) Relasi yang terbentuk karena adanya jabatan fungsional. Apabila relasi antara aktor didasari oleh lebih dari satu jenis hubungan, maka relasi antara aktor tersebut semakin kuat dan skor relasinya semakin tinggi. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan jaringan aktor yang mendekati kondisi aktual di lapangan, sehingga kategorisasi jenis relasi yang digunakan dalam penelitian ini sekaligus sebagai pembatas aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan ini.

¹ Pembelian profil perusahaan dari Ditjen AHU dilakukan mulai 27 Oktober - 04 Oktober 2021

2.3 Analisis Data

Pada analisis jaringan sosial terdapat berbagai macam pengukuran yang dapat mengidentifikasi aktor-aktor yang paling kuat dalam jaringan. Sentralitas menjadi salah satu konsep yang paling banyak dipelajari. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam studi ini yaitu sentralitas tingkatan dan sentralitas perantara. Sentralitas derajat (*degree centrality*) mengacu pada berapa banyak koneksi langsung yang dimiliki oleh seorang aktor [8]. Sentralitas perantara (*betweenness centrality*) berkaitan dengan berapa kali seorang aktor berperan sebagai jembatan antara dua aktor/ kelompok yang terputus [9]. Aktor yang berfungsi sebagai perantara dapat melihat informasi yang lebih luas secara cepat yang mereka terjemahkan dari berbagai kelompok yang berbeda.

Hubungan antara aktor dengan perusahaan dianalisis menggunakan *degree centrality* untuk mengidentifikasi aktor yang paling banyak terafiliasi dan paling tinggi kedudukannya di dalam suatu perusahaan tertentu. Semakin banyak perusahaan dan semakin tinggi kedudukannya di perusahaan tersebut, maka aktor tersebut akan menghasilkan nilai yang paling tinggi. Hubungan antara aktor dengan aktor lainnya dalam jaringan oligarki dianalisis dengan menggunakan *degree centrality* untuk mengidentifikasi aktor mana yang paling banyak memiliki relasi dan *betweenness centrality* berperan sebagai perantara diantara aktor dengan latar belakang yang berbeda. Analisis Jaringan Sosial dianalisis menggunakan perangkat lunak *UCINET for Windows version 6* [10] dan *Netdraw 2.177* [11].

■ Moster yang melambangkan Oligarki di Indonesia menampakkan dirinya di Greenpeace Youth Festival 2022, Ballroom Kuningan City, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022.



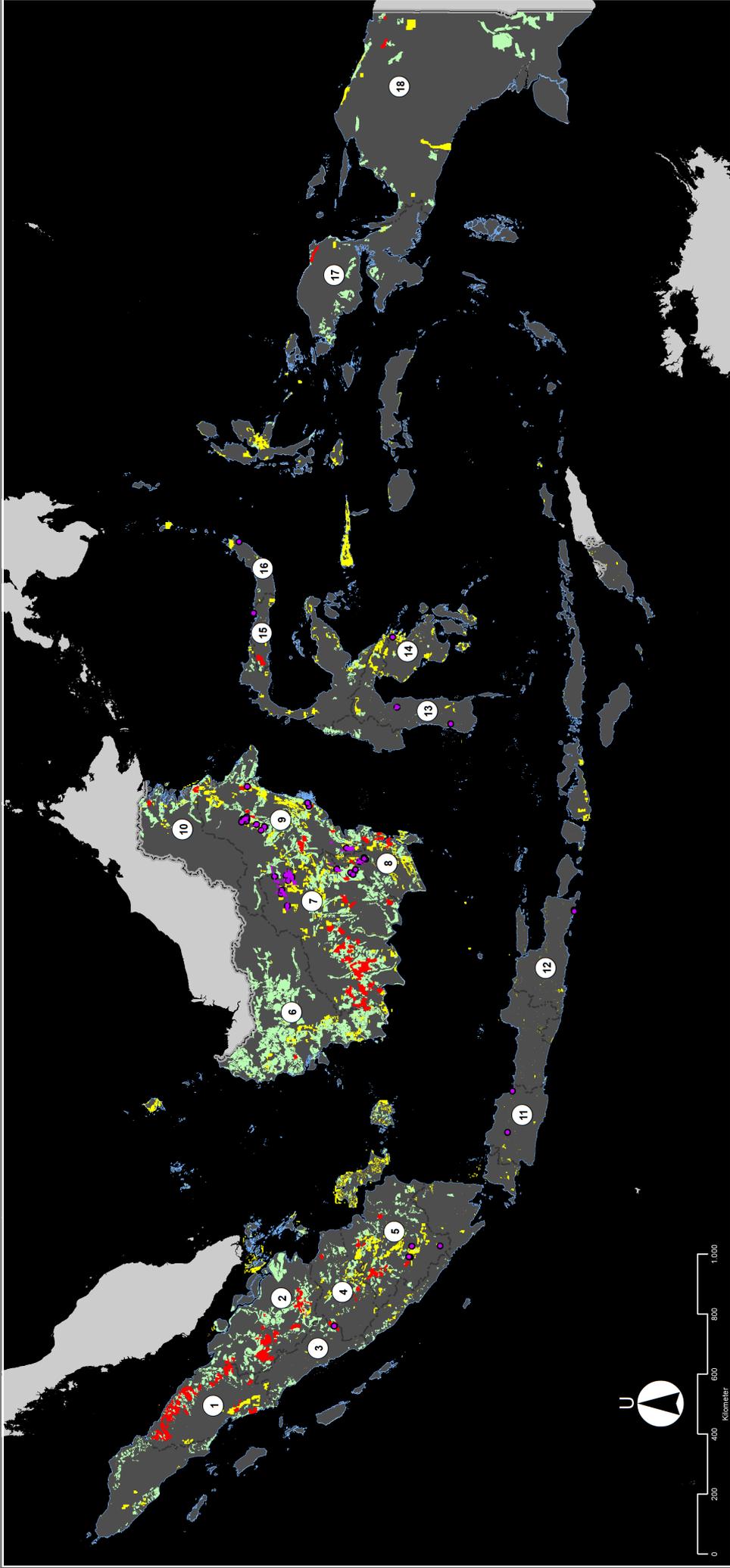
2.4 Tantangan Metodologis

Setiap studi memiliki keterbatasan, termasuk studi ini juga memiliki keterbatasan khususnya terkait data yang digunakan. Aktor-aktor yang dianalisis pada studi ini sepenuhnya berdasarkan data sekunder, yaitu publikasi sebelumnya mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam Omnibus Law dan AHU. Aktor-aktor tersembunyi yang mungkin secara informal mempengaruhi dinamika jaringan oligarki, tidak disebutkan dan tidak termasuk dalam analisis jaringan oligarki sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena kelemahan utama dari sumber data dokumen yaitu tidak dimungkinkan eksplorasi data, sehingga jaringan aktor yang ditampilkan menjadi terbatas.

Untuk mengatasi kelemahan ini, kami melakukan triangulasi untuk memverifikasi data yang sudah diperoleh dan mengurangi distorsi informasi. Data yang dikumpulkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pengumpulan data dan kemampuan peneliti itu sendiri dalam memperoleh informasi. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya mengacu dari satu sumber tapi juga di-*cross-check* melalui hasil penelitian lain yang terkait, laporan instansi dan berita dari berbagai media elektronik.



- Seorang pekerja membawa papan bergambar monster yang melambangkan Oligarki, pada aksi bersama koalisi untuk menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kontroversial, berlokasi di Jakarta, 28 Februari 2023.



- Konsesi perkebunan sawit yang dikuasai oligarki
- Konsesi tambang dan energi yang dikuasai oligarki
- Konsesi perkebunan sawit lainnya
- Konsesi tambang dan energi lainnya

○ Provinsi

- 1. Sumatera Utara
- 2. Riau
- 3. Sumatera Barat
- 4. Jambi
- 5. Sumatera Selatan
- 6. Kalimantan Barat
- 7. Kalimantan Tengah
- 8. Kalimantan Selatan
- 9. Kalimantan Timur
- 10. Kalimantan Utara
- 11. Jawa Barat
- 12. Jawa Timur

- 13. Sulawesi Selatan
- 14. Sulawesi Tenggara
- 15. Gorontalo
- 16. Sulawesi Utara
- 17. Papua Barat
- 18. Papua

03.

Hasil Analisis dan Pembahasan

3.1 Analisis Jaringan Sosial (SNA) pada Sektor Tambang dan Energi

Pertambangan dan energi merupakan sektor yang diuntungkan dengan adanya UU Cipta Kerja (UUCK) yang sudah disahkan. Terdapat beberapa pasal di UUCK Nomor 11 Tahun 2020 yang menunjukkan keberpihakan pada usaha pertambangan. Misalnya, pasal 39 UUCK yang membahas beberapa ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 39 ayat 1 menyisipkan satu pasal di UU Minerba yakni pasal 128A yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat dikenakan royalti sebesar nol persen². Peraturan ini dapat berpotensi menurunkan pendapatan pemerintah terutama pemerintah daerah.

Apabila dilihat lebih jauh, aktor yang terlibat dalam proses perumusan dan pengesahan UUCK ini merupakan pengusaha tambang dan energi yang memiliki jabatan publik/PEP ataupun pengusaha-pengusaha yang berelasi dengan PEP. Oleh karena itu, pada studi ini analisis jaringan aktor sangat diperlukan untuk memahami siapa sesungguhnya aktor dibalik Omnibus Law yang terhubung ke perusahaan tambang dan energi sekaligus siapakah aktor yang paling kuat berdasarkan posisi strukturalnya dalam jaringan oligarki.

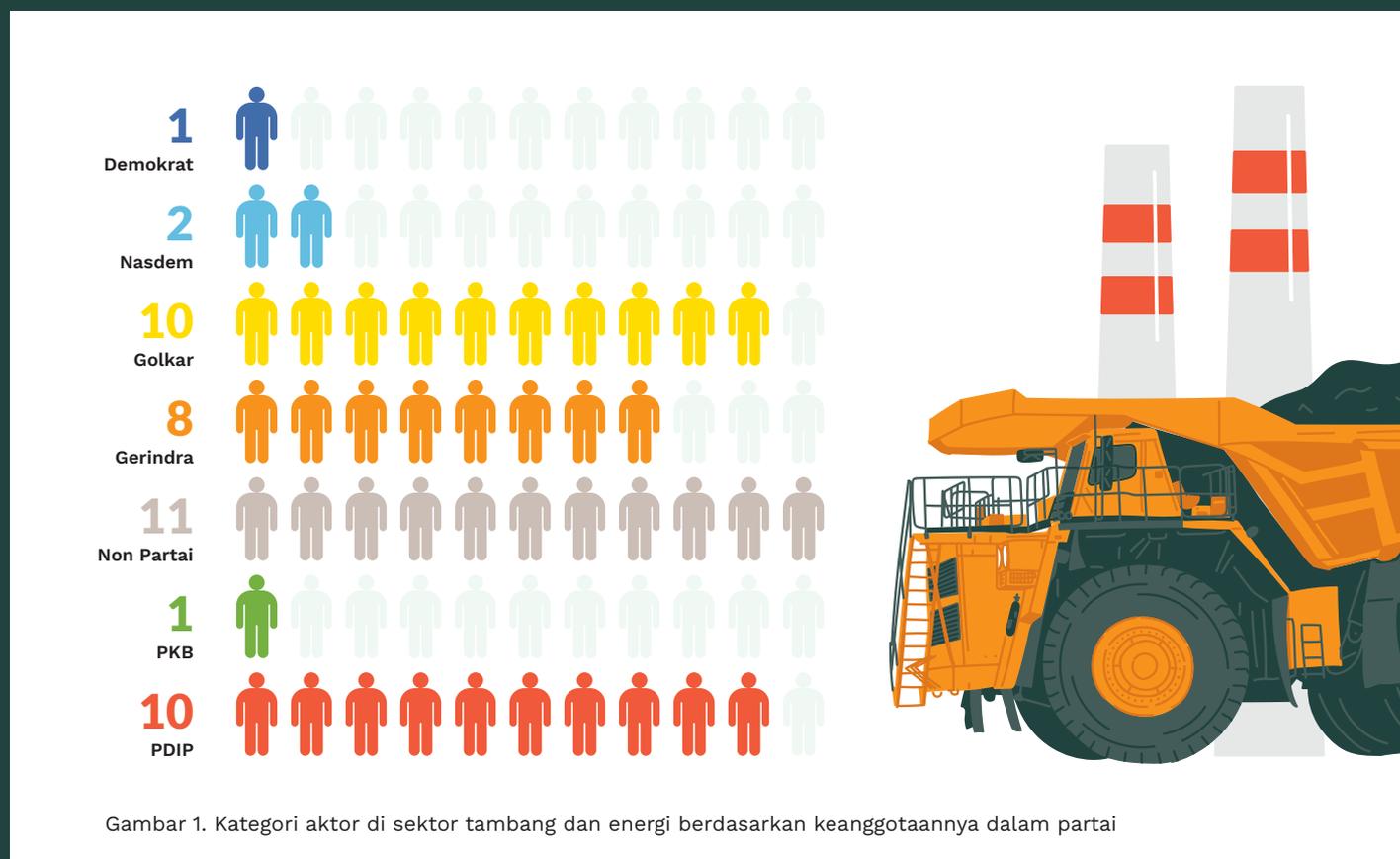
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3.1.1 Atribut aktor dalam jaringan oligarki pada sektor tambang dan energi

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa terdapat sekitar 43 aktor terafiliasi dengan 97 perusahaan tambang dan energi. Aktor-aktor ini terdiri dari pengusaha yang menjadi PEP maupun para pengusaha yang terkoneksi dengan PEP tersebut. Terdapat beberapa profil perusahaan yang terafiliasi dengan beberapa aktor tetapi informasi mengenai perusahaan tersebut tidak tersedia di AHU, sehingga perusahaan tersebut tidak dimasukkan di dalam studi ini. Akan tetapi, aktor tersebut tetap dimasukkan dalam analisis jaringan sosial antar aktor karena memiliki keterkaitan dengan aktor lainnya yang terhubung dengan perusahaan tambang dan energi.

Relasi kekuasaan yang cair antara politik dengan bisnis karena partai politik membutuhkan pengusaha dan begitu sebaliknya, sehingga relasi diantaranya dapat menguntungkan satu sama lain [12]. Pengusaha membutuhkan politik untuk menyelamatkan dan mengembangkan usaha

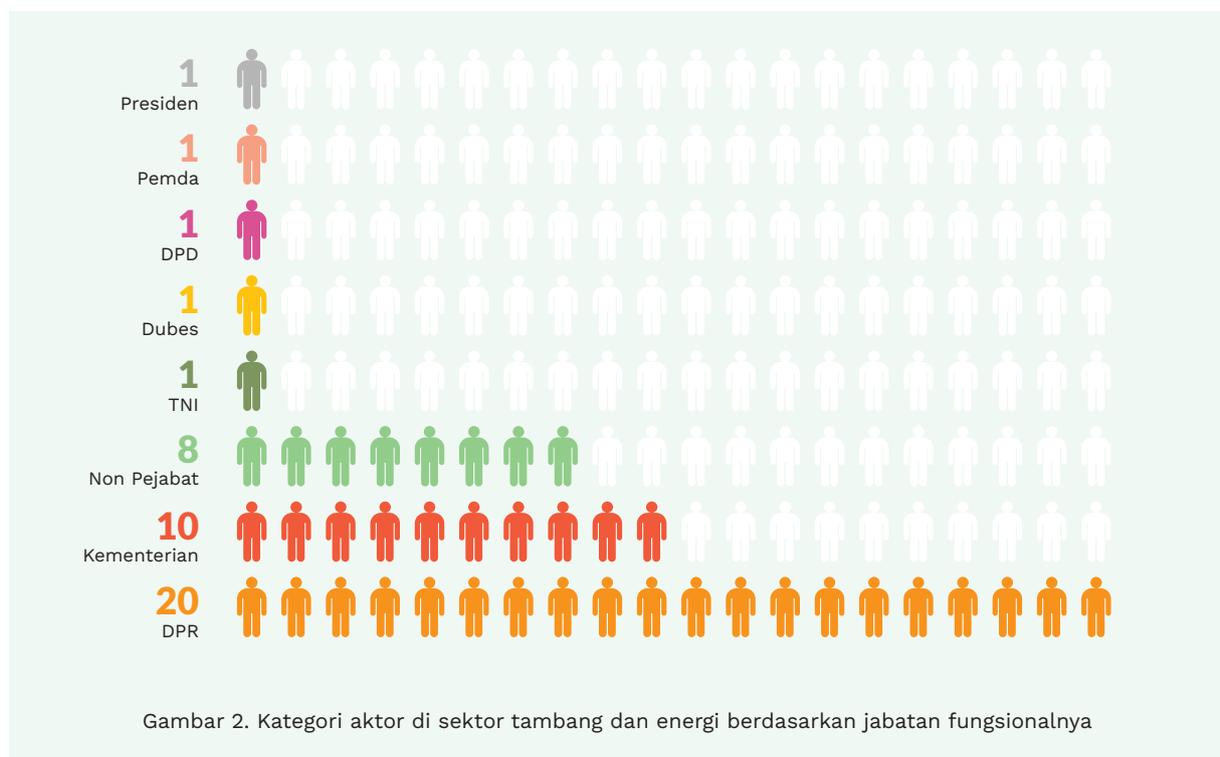
mereka, di sisi lain partai politik membutuhkan peran pengusaha terkait dengan pendanaan partai. Di samping itu, kedekatan kedua belah pihak dapat mempermudah proses *state capture* yang mana kebijakan publik akan mengakomodir kepentingan pengusaha. Jaringan ini didominasi oleh kader-kader partai terutama kader dari partai PDIP dan Golkar (Gambar 1). Aktor-aktor yang terdapat di dalam relasi ini terdiri dari aktor yang memiliki jabatan fungsional dan aktor yang tidak memiliki jabatan. Hampir seluruh aktor pernah menjabat berbagai posisi di pemerintahan, sehingga jabatan pada setiap aktor ditentukan oleh jabatan terakhir yang mereka jalani. Kategori TNI merupakan PEP yang pernah atau sedang menjabat di kesatuan TNI dan belum pernah menduduki jabatan fungsional di kategori lainnya. Kategori Kementerian merupakan PEP yang terdiri dari Menteri dan Staf Khusus.



Gambar 1. Kategori aktor di sektor tambang dan energi berdasarkan keanggotaannya dalam partai

Aktor yang memiliki jabatan fungsional sebagian besar merupakan anggota DPR dan Menteri (Gambar 2). Menteri dan anggota DPR yang diidentifikasi pada studi ini adalah PEP yang masih aktif menjabat maupun yang sudah tidak aktif menjabat. Aktor-aktor yang termasuk dalam kategori non pejabat merupakan pengusaha yang tidak memiliki jabatan fungsional tetapi terafiliasi dengan partai politik, tim sukses Jokowi, memiliki perusahaan tambang dan energi, serta terlibat dalam perumusan UUCK. Terdapat delapan aktor dalam jaringan yang merupakan non pejabat. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan

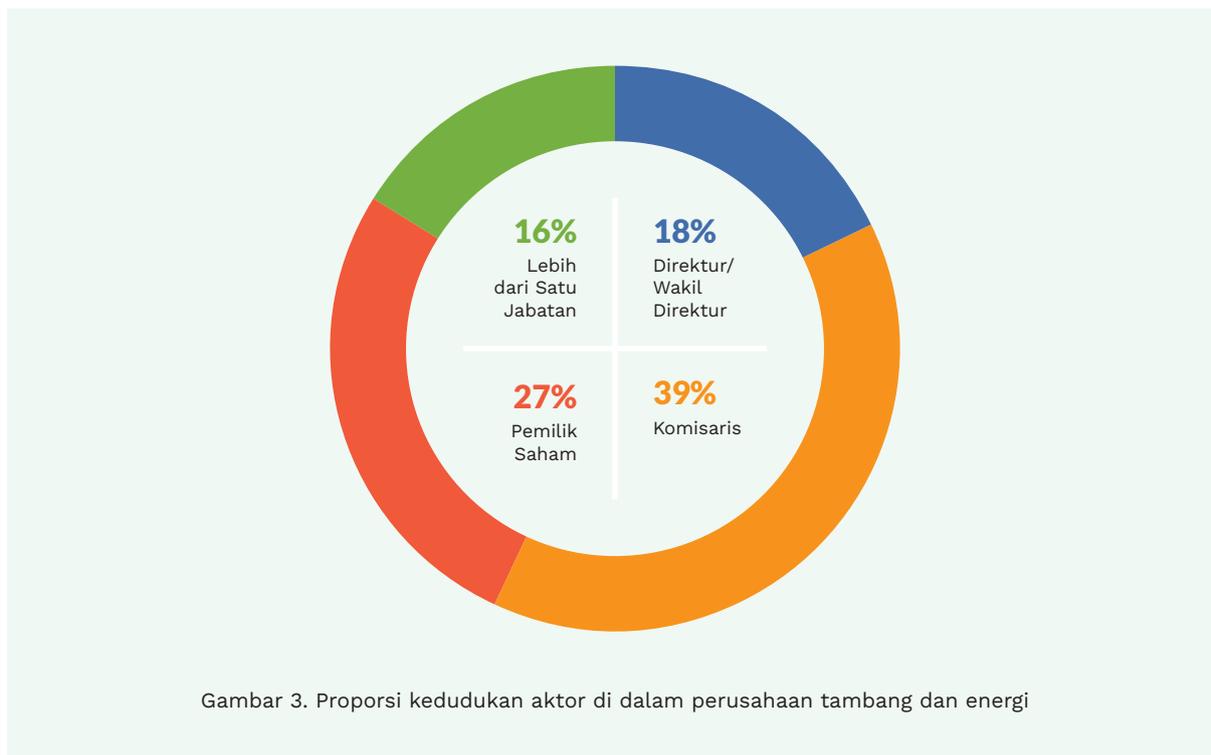
oligarki ini didominasi oleh pengusaha yang duduk di kursi pemerintahan/PEP dibandingkan dengan pengusaha yang tidak memiliki jabatan fungsional. Apabila dikaitkan dengan kebijakan Omnibus Law yang dinilai berpihak kepada pengusaha, maka tujuan pengusaha masuk ke ranah politik untuk melancarkan kepentingan usaha mereka melalui *state capture*. Pengusaha menggunakan struktur politik untuk mendesain kebijakan, aturan hukum, serta aturan main dalam berbagai kompetisi bisnis atau politik yang menguntungkan dirinya dan memungkinkannya melakukan akumulasi kapital [13].



Aktor dalam jaringan oligarki yang terafiliasi dengan lebih dari 100 perusahaan tambang dan energi ini sebagian besar berperan sebagai komisaris³ (Gambar 3). Komisaris independen yang memiliki background politik digunakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalah politik yang menyangkut perusahaan [14]. Komisaris yang memiliki hubungan politik

juga dapat memanfaatkan posisinya untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan parlemen dan pemerintah yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sehingga meningkatkan profitabilitas dan akhirnya meningkatkan kinerja operasional perusahaan [12].

3 Kategori komisaris termasuk di dalamnya komisaris independen, komisaris utama, wakil komisaris utama



Gambar 3. Proporsi kedudukan aktor di dalam perusahaan tambang dan energi

3.1.2 Aktor yang terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi

Hasil analisis SNA menunjukkan bahwa setiap aktor terhubung langsung dengan perusahaan tambang dan energi kecuali Presiden Jokowi. Meskipun Jokowi tidak terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi, tetapi salah satu pemegang saham perusahaan Jokowi adalah perusahaan milik Luhut. Sejak tahun 2009, Toba Sejahtera yang merupakan perusahaan milik Luhut merupakan salah satu pemilik saham dari perusahaan milik keluarga Jokowi yaitu PT Rakabu Sejahtera [15].

Gambar 4 memberikan visualisasi hubungan antara aktor dengan perusahaan, serta menunjukkan beberapa aktor yang memiliki kedudukan di perusahaan yang sama. Node yang berbentuk lingkaran mewakili aktor sedangkan node berbentuk bujur sangkar mewakili perusahaan. Node dan label yang lebih besar mewakili aktor dengan jumlah koneksi yang lebih tinggi, baik itu koneksi ke perusahaan maupun dengan aktor lainnya dalam perusahaan yang sama. Warna pada node menunjukkan atribut

partai dari masing-masing aktor, sehingga lingkaran dengan warna yang sama artinya aktor berasal dari partai yang sama. Warna pada label menunjukkan atribut jabatan fungsional dari masing-masing aktor, sehingga warna label yang sama artinya aktor tersebut memiliki jabatan yang sama. Ketebalan garis atau relasi menunjukkan bahwa semakin tebal garis maka semakin tinggi kedudukan seorang aktor dalam suatu perusahaan.

Aktor yang paling banyak terkoneksi dengan perusahaan adalah Luhut Binsar Panjaitan dengan nilai *degree* sebesar 36 (Tabel 1). Nilai *degree* ini menggambarkan jumlah dan kekuatan koneksi yang dimiliki oleh seorang aktor. Pada jaringan ini, nilai *degree* menggambarkan perusahaan mana saja yang terafiliasi dengan aktor, bukan menggambarkan hubungan antar aktor itu sendiri. Apabila aktor banyak terafiliasi dengan perusahaan dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam sebuah perusahaan tersebut, maka akan menghasilkan nilai *degree* yang tinggi.

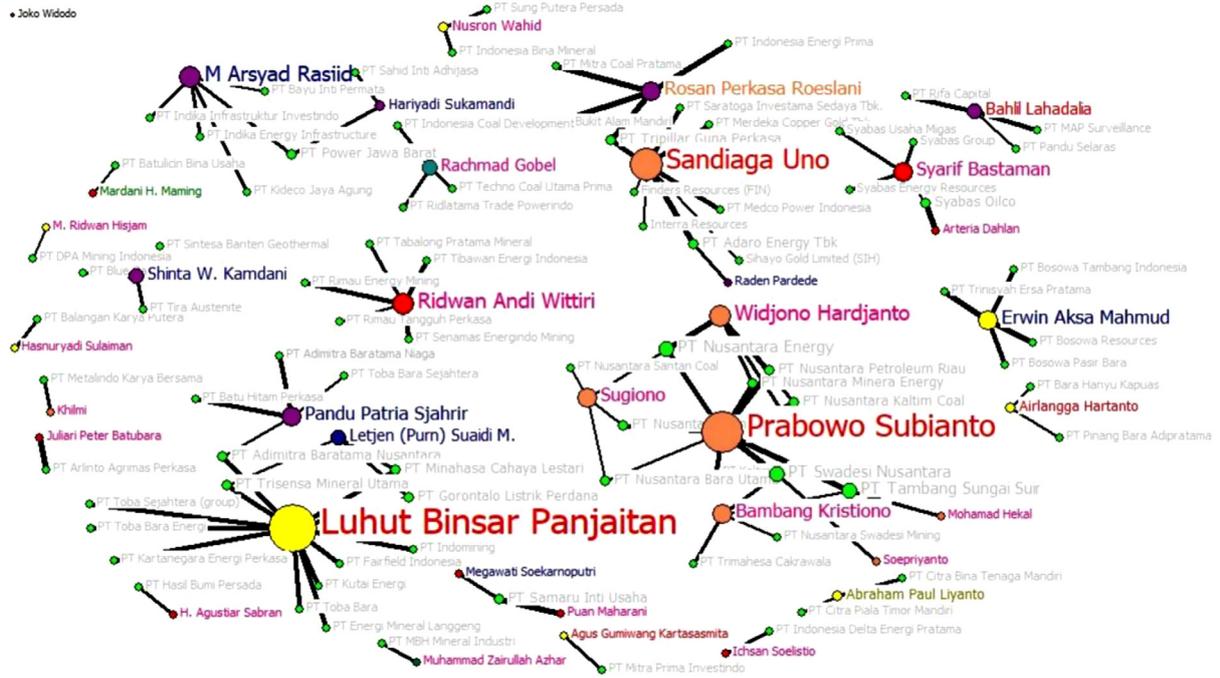
Tabel 1. Aktor dengan nilai *degree* tertinggi dalam jaringan aktor dengan perusahaan

Aktor	Degree
 Luhut Binsar Panjaitan	36.00
 Prabowo Subianto	31.00
 Sandiaga Uno	19.00
 Rosan Perkasa Roeslani	16.00
 Erwin Aksa Mahmud	14.00
 Ridwan Andi Wittiri	12.00
 Widjono Hardjanto	12.00
 M Arsyad Rasjid	9.00
 Pandu Patria Sjahrir	8.00
 Bahlil Lahadalia	7.00
 Syarif Bastaman	7.00

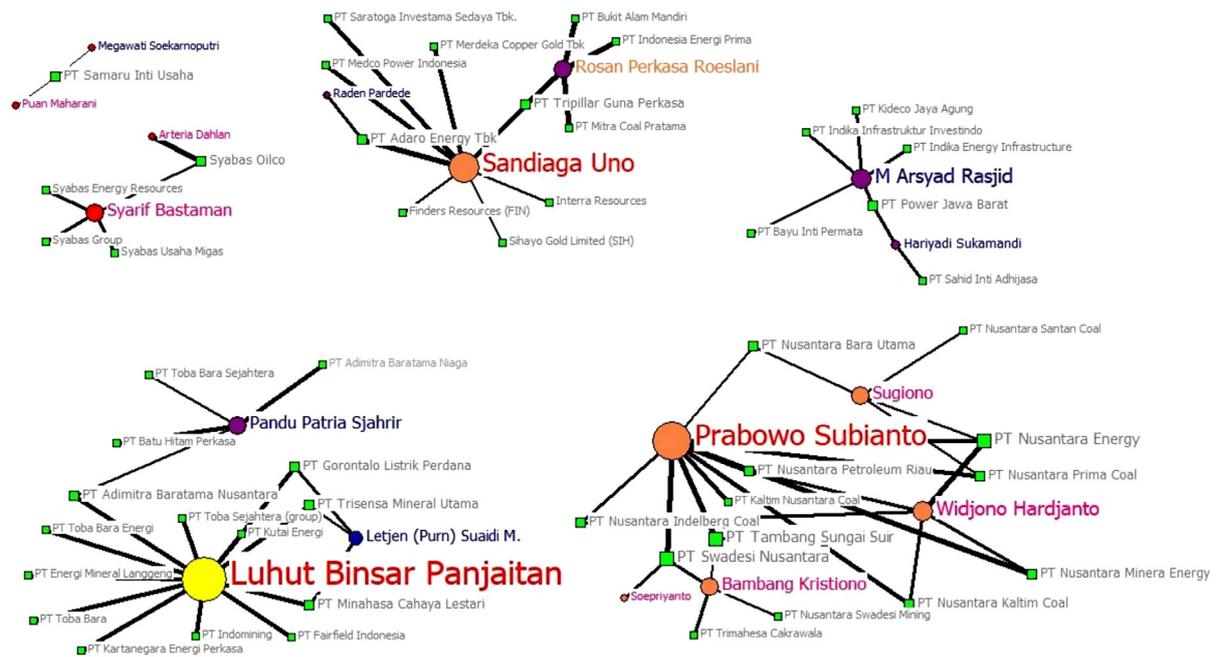
Luhut Binsar merupakan PEP yang paling banyak memiliki perusahaan dan terhubung dengan aktor lainnya yaitu **Pandu Patria Sjahrir** dan Letjen (Purn) Suaidi. Terdapat tiga perusahaan yang terhubung dengan Luhut dan Letjen (Purn) Suaidi yaitu PT Minahasa Cahaya Lestari, PT Trisensa Mineral Utama, dan PT Gorontalo Listrik Perdana. Selain itu, Luhut juga terhubung dengan keponakannya Pandu Patria di perusahaan PT Adimitra Baratama Nusantara. Gambar 5 menyajikan visualisasi *zoom in* aktor-aktor yang memiliki relasi dengan aktor lainnya di perusahaan yang sama.

Prabowo merupakan aktor dengan nilai *degree* tertinggi setelah Luhut karena Prabowo terhubung ke banyak perusahaan dan aktor lainnya. Hal yang menarik adalah seluruh aktor yang terhubung dengan Prabowo di perusahaan yang sama berasal dari partai Gerindra dan memiliki jabatan di DPR. Prabowo terhubung dengan Sugiono di tiga perusahaan yaitu PT Nusantara Bara Utama, PT Nusantara Prima Coal, dan PT Nusantara Energy. Lima perusahaan yang dimiliki oleh **Widjono Hardjanto** juga terhubung dengan Prabowo Subianto, antara lain PT Nusantara Energy, PT Nusantara Indelberg Coal, PT Nusantara Petroleum Riau, PT Nusantara Minera Energy, dan PT Nusantara Kaltim Coal. Selain itu, Prabowo juga berada di perusahaan PT Tambang Sungai Suir bersama dengan Bambang Kristiono dan Mohamad Hekal. Selain itu, Prabowo juga terhubung dengan Bambang Kristiono dan Soepriyanto di perusahaan PT Swadesi Nusantara.

Sebelum terjun ke dunia politik, **Sandiaga Uno** dikenal sebagai pengusaha yang sukses di Indonesia. Aktor ini memiliki nilai *degree* yang tinggi karena terafiliasi dengan banyak perusahaan tambang dan energi. Sandiaga Uno juga terhubung dengan pengusaha Rosan Perkasa di PT Tripillar Guna Perkasa dan Raden Pardede di PT Adaro Energy Tbk. **Arsjad Rasjid** juga terkoneksi dengan aktor Hariyadi Sukamdani di perusahaan PT Power Jawa Barat. Keduanya tidak terafiliasi dengan partai politik dan tidak memiliki jabatan fungsional.



Gambar 4. Jaringan aktor dengan perusahaan tambang dan energi



Gambar 5. Aktor yang terhubung dengan aktor lain di perusahaan yang sama

Keterangan:

Bentuk node	○ PEP	□ Perusahaan						
Warna node	● PDI	● Golkar	● Nasdem	● Gerindra	● PKB	● Demokrat	● Non Partai	● Perusahaan
Warna label	● Presiden	● Menteri	● DPR	● Duta Besa	● Pemda	● DPD	● Tidak ada jabatan	

Syarif Bastaman dan Arteria Dahlan yang berasal dari partai PDIP juga terhubung di perusahaan yang sama yaitu Syabas Oilco. Syarif Bastaman merupakan mantan anggota DPR RI Komisi IV periode 2009-2014 [16], sedangkan Arteria Dahlan merupakan anggota DPR yang masih aktif di dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf [17]. Apabila

aktor-aktor sebelumnya terhubung dengan aktor lain di perusahaan yang sama, berbeda dengan **Erwin Aksa Mahmud**, **Ridwan Andi**, dan **Bahlil Lahadalia** tidak terhubung dengan aktor lainnya. Ketiga aktor ini memiliki nilai *degree* yang tinggi karena memiliki kedudukan yang tinggi di beberapa perusahaan tambang dan energi.

3.1.3 Struktur relasional aktor dalam jaringan aktor pada sektor tambang dan energi

Analisis jaringan sosial mengidentifikasi struktur hubungan yang memungkinkan jaringan berfungsi. Dalam studi ini, relasi diantara para aktor memiliki kekuatan yang berbeda tergantung frekuensi komunikasi yang terbentuk diantara aktor. Keterlibatan aktor dalam proses perumusan UUCK didasari oleh relasi yang sudah terbentuk sebelumnya. Terdapat beberapa nama aktor yang ada di jaringan ini tidak ada di jaringan relasi aktor dengan perusahaan, antara lain Erick Thohir, Azis Syamsudin, Sakti Wahyu Trenggono, dan Lamhot Sinaga. Perusahaan yang dimiliki oleh Erick Thohir tidak termasuk dalam sektor tambang dan energi. Perusahaan yang terafiliasi dengan Azis Syamsudin, Sakti Wahyu, dan Lamhot Sinaga informasinya tidak tersedia di AHU atau mereka tidak terkonfirmasi memiliki kedudukan di perusahaan tersebut. Meskipun demikian, aktor-aktor tersebut tetap dimasukkan dalam analisis relasi antar aktor karena mereka memiliki relasi dengan aktor yang lain dalam berbagai konteks termasuk proses perumusan UUCK.

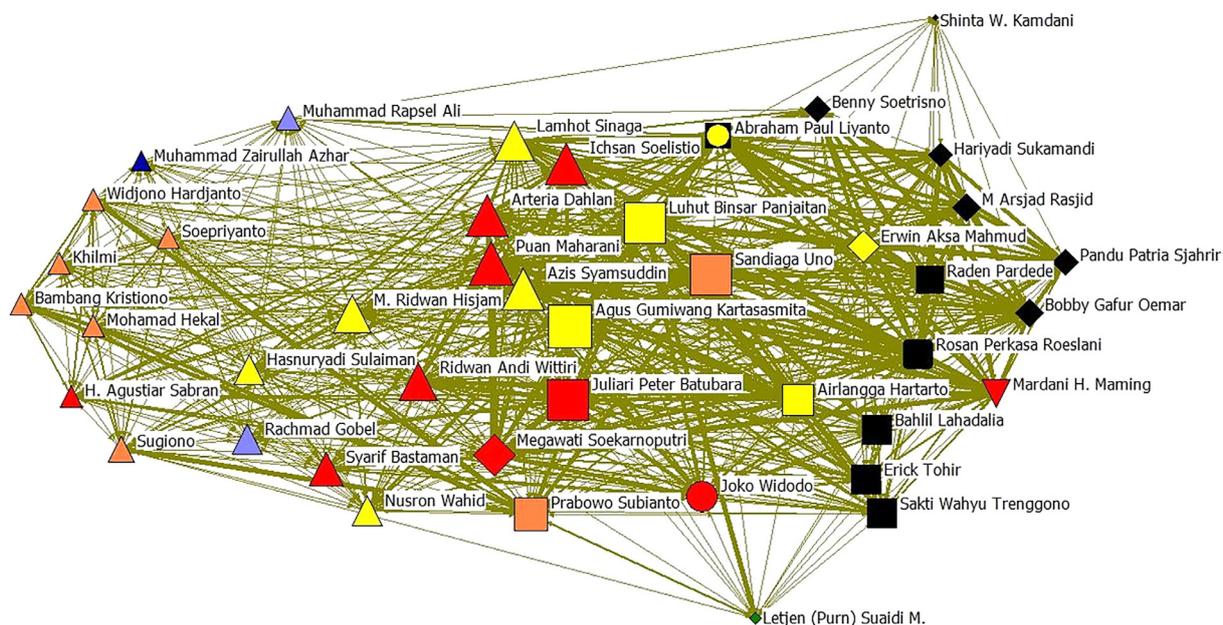
Statistik deskriptif dapat memberikan pemahaman tentang gambaran struktur jaringan secara keseluruhan. Hasil analisis ini menunjukkan jaringan yang masif dan kuat, ditunjukkan dengan jumlah relasi yang terbentuk hingga ribuan dengan aktor yang hanya berjumlah 43 orang. Jaringan ini juga relatif terkonsolidasi dengan baik, sebagaimana tercermin dalam skor kepadatan yang tinggi. Angka kepadatan bergerak dari 0 hingga 1, dimana semakin mengarah ke 1 berarti semakin padat suatu jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 80% aktor yang ada di dalam jaringan saling berinteraksi satu sama lain.

Jaringan oligarki ini juga tidak menunjukkan adanya struktur hierarkis dalam jaringan. Hal ini ditunjukkan dengan angka kedekatan yang mendekati 1 dan ukuran diameter yang relatif rendah. Diameter adalah ukuran yang menunjukkan jarak terjauh di antara dua aktor supaya bisa berinteraksi. Suatu jaringan dengan diameter 3, artinya jarak terjauh (maksimal) aktor dalam jaringan bisa berinteraksi satu sama lain yaitu dengan diperantarai oleh 3 aktor lain.

Tabel 2. Statistik deskriptif jaringan aktor pada sektor tambang dan energi

Statistik deskriptif	Jaringan
Jumlah Aktor	43
Jumlah relasi	1.138
Kepadatan Jaringan	0,729
Diameter	3
Kedekatan	0,83

Gambar 6 memberikan visualisasi hubungan tingkatan, yaitu ukuran yang menunjukkan aktor dengan jumlah relasi yang paling banyak dan paling kuat dibandingkan dengan aktor yang lainnya. Hubungan yang lebih kuat ditunjukkan dengan garis yang lebih tebal. Node dan label yang lebih besar mewakili aktor dengan jumlah koneksi yang lebih tinggi. Gambar 6 juga menyoroti aktor yang berasal dari partai yang sama memiliki warna node yang sama dan aktor dengan jabatan fungsional yang sama memiliki bentuk node yang sama.



Gambar 6. Sentralitas tingkatan dalam jaringan aktor di sektor tambang dan energi

Keterangan:

Warna node	● PDI	● Golkar	● Nasdem	● Gerindra	● PKB	● Demokrat	● Non Partai
Bentuk node	○ Presiden	△ DPR	□ Menteri	○ Duta Besar	▽ Pemda	■ DPD	◇ Tidak ada jabatan

Apabila dilihat dari struktur jaringannya, aktor-aktor yang memiliki jumlah dan kekuatan relasi yang tinggi berada di bagian tengah jaringan dan aktor dengan jumlah dan kekuatan relasi yang rendah berada di tepi jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktur jaringan sangat bergantung dengan aktor yang memiliki relasi yang banyak dan kuat. Aktor yang terafiliasi dengan partai dan jabatan yang sama cenderung memiliki jarak yang dekat satu sama lain. Bagian kiri jaringan didominasi oleh aktor dari partai Gerindra yang memiliki jabatan sebagai anggota DPR, sedangkan bagian kanan jaringan didominasi oleh pengusaha yang tidak terafiliasi dengan partai. Aktor yang berasal dari partai PDIP dan

Golkar cenderung menyebar di tengah-tengah jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua partai tersebut merupakan partai yang dominan dalam jaringan oligarki ini.

Hubungan utama dari Gambar 6 ditampilkan pada Tabel 3, yang memberi peringkat 10 aktor yang paling banyak dan paling kuat relasinya dalam jaringan. Aktor dengan nilai *degree* yang besar sangat berpotensi/berperan dalam menyebarkan informasi dan memengaruhi aktor lain dalam jaringan karena dapat menjangkau sejumlah besar aktor dan arus informasi di seluruh jaringan.

Tabel 3. Aktor dengan derajat tingkatan tertinggi dalam jaringan aktor di sektor tambang dan energi

Aktor	Degree
 Luhut Binsar Panjaitan	82.00
 Puan Maharani	79.00
 Megawati Soekarnoputri	76.00
 Rosan Perkasa Roeslani	74.00
 Sandiaga Uno	70.00
 Mardani H. Maming	68.00
 Airlangga Hartarto	67.00
 Azis Syamsuddin	67.00
 Juliari Pieter Batubara	66.00
 Ichsan Soelistio	66.00

Luhut Binsar Panjaitan merupakan aktor dengan nilai *degree* tertinggi. Pada analisis sebelumnya, ditunjukkan bahwa Luhut merupakan aktor yang paling banyak terafiliasi dengan perusahaan dan pada analisis relasi antar aktor Luhut memiliki relasi yang paling banyak dan paling kuat. Luhut dapat memiliki nilai *degree* yang paling tinggi karena beberapa faktor. Pertama, Luhut terafiliasi dengan partai Golkar yang menjadi salah satu partai yang mendominasi dalam jaringan oligarki ini. Kedua, aktor yang merupakan tim sukses Jokowi-Ma'ruf ini juga dikenal sebagai aktor yang paling banyak menduduki jabatan dalam beberapa tahun belakangan [18]. Kondisi tersebut menjadi momentum bagi Luhut untuk memperkuat relasi yang dia miliki. Ketiga, meskipun tidak tergabung dalam organisasi bisnis, tetapi Luhut merupakan salah satu pengusaha yang memiliki banyak perusahaan tambang. Oleh karena itu, Luhut memiliki banyak koneksi dengan pengusaha lainnya termasuk keponakannya Pandu dan rekan anggota/ mantan anggota TNI lainnya yang menjadi pengusaha.

Puan Maharani bersama dengan ibunya **Megawati Soekarnoputri** memiliki relasi yang tinggi dibandingkan dengan aktor lainnya dalam jaringan. Seperti yang diketahui bahwa sebelumnya Megawati Soekarnoputri sudah tidak menduduki jabatan fungsional, tetapi Megawati sekarang sudah memiliki posisi baru sebagai Dewan Pengarah di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) [19]. Sebagai orang yang paling penting di PDIP, Megawati masih menjadi orang yang berpengaruh dalam menentukan arah gerak politik Presiden [20]. Puan Maharani yang menjabat sebagai ketua DPR merupakan jabatan yang sangat strategis karena lembaga ini yang merumuskan kebijakan publik dan anggaran negara. Puan dapat terhubung dengan berbagai pengusaha maupun PEP yang memiliki kepentingan untuk melakukan *state capture* [21].

Rosan Perkasa Roeslani yang merupakan duta besar Amerika [22] juga menjadi aktor yang paling banyak memiliki relasi dengan aktor yang lainnya dan menjadi salah satu aktor intelektual dalam perumusan UUCK [23]. Rosan bersama dengan

Sandiaga Uno merupakan pengusaha besar yang pernah tergabung di KADIN, sehingga mereka mengenal aktor lain yang merupakan pengusaha di Indonesia. Rosan menjabat sebagai Ketua Umum Kadin pada tahun 2015-2020, sedangkan Sandiaga Uno menjadi Wakil Ketua Umum pada tahun 2004 [24]. Selain itu, terjunnya kedua pengusaha ini di bidang politik menambah relasi mereka dengan aktor-aktor yang berada di kursi pemerintahan. Sandiaga Uno juga tergabung dalam partai Gerindra yang di dalamnya banyak pengusaha yang memiliki jabatan fungsional di dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Mardani H. Maming merupakan salah mantan Bupati Tanah Bumbu selama dua periode [25] yang memiliki nilai *degree* yang cukup tinggi. Mardani merupakan salah satu aktor yang berperan sebagai SATGAS Omnibus Law [23] dan ketua HIPMI [25], sehingga aktor ini banyak memiliki relasi dengan pengusaha maupun aktor lainnya yang memiliki kedudukan di kursi pemerintahan. Aktor yang berasal dari partai PDIP ini juga berperan sebagai salah satu tim sukses Jokowi-Ma'ruf [25] sehingga memiliki relasi dengan aktor lain dalam tim sukses tersebut.

Airlangga Hartarto dan **Azis Syamsudin** juga merupakan aktor intelektual dalam perumusan UUCK. Meskipun Azis Syamsudin tidak terkonfirmasi berafiliasi dengan perusahaan

tambang dan energi, tetapi aktor ini sangat berperan dalam sidang pembentukan maupun pengesahan UUCK [23]. Azis Syamsudin bersama dengan Puan Maharani banyak bekerja dalam perumusan dan pengesahan UUCK yang memiliki keberpihakan kepada pengusaha. Oleh karena itu, Azis Syamsudin memiliki banyak relasi dengan pengusaha baik itu yang memiliki jabatan fungsional maupun tidak. Airlangga Hartarto yang merupakan petinggi partai Golkar tentu akan memiliki banyak relasi karena partai Golkar mendominasi dalam jaringan ini. Airlangga juga merupakan salah satu tim sukses Jokowi-Ma'ruf sehingga relasi juga terbentuk dengan banyak aktor lain yang menjadi tim sukses [26].

Juliari Peter Batubara memiliki banyak relasi dengan aktor lain yang berasal dari partai PDIP yang mendominasi dalam jaringan oligarki. Aktor ini juga merupakan tim sukses Jokowi-Ma'ruf dan menduduki jabatan fungsional sebagai Menteri sosial (sudah non aktif) [27]. Juliari yang memiliki kedudukan di KADIN dan IMI [28] juga menjadi dasar yang dapat menjelaskan bahwa aktor ini banyak memiliki relasi dengan pengusaha. **Ichsan Soelistio** yang berasal dari partai PDIP yang mendominasi serta pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPR menyebabkan aktor ini memiliki banyak relasi. Ichsan juga merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam perumusan Omnibus Law [23].

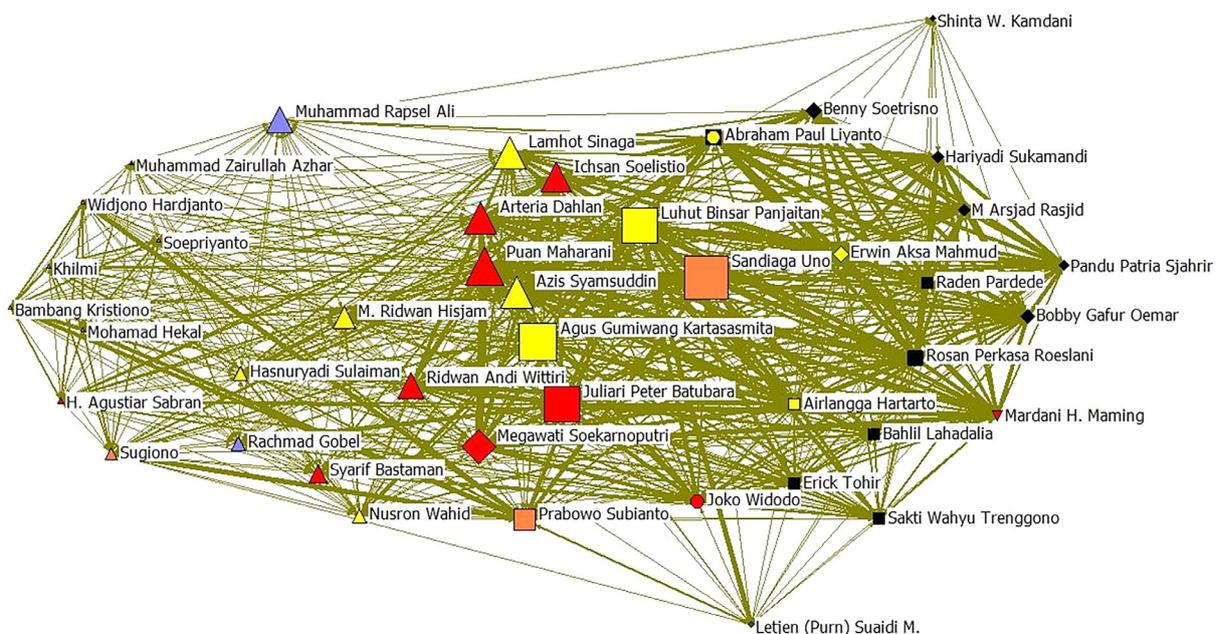
- Seorang pekerja mengenakan topeng gurita yang melambangkan oligarki, pada aksi bersama koalisi untuk menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kontroversial, berlokasi di depan Gedung DPR RI Jakarta. 28 Februari 2023.



© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Gambar 7 memberikan visualisasi hubungan keberantaraan, yaitu ukuran yang berapa kali seorang aktor berperan sebagai jembatan diantara dua aktor/ kelompok aktor yang terputus. Node dan label yang lebih besar mewakili aktor yang banyak berperan sebagai perantara di dalam jaringan tersebut. Hubungan utama dari Gambar 7 ditampilkan pada Tabel 4, yang memberi peringkat 10 aktor yang paling banyak berperan sebagai perantara. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor yang memiliki nilai keberantaraan

tertinggi tidak sama dengan aktor yang memiliki nilai tingkatan yang tertinggi. Aktor dengan nilai keberantaraan yang paling tinggi memiliki beberapa potensi. Pertama, aktor dapat menentukan keanggotaan suatu jaringan karena aktor ini menghubungkan dua aktor/ kelompok aktor yang berbeda dalam jaringan. Kedua, sebagai kontrol informasi. Ketiga, posisi sebagai perantara memungkinkan aktor untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.



Gambar 7. Sentralitas keberantaraan dalam jaringan aktor di sektor tambang dan energi

Tabel 4. Aktor dengan derajat keperantaraan tertinggi dalam jaringan aktor di sektor tambang dan energi

Aktor	Betweenness
 Sandiaga Uno	16.537
 Agus Gumiwang Kartasasmita	14.274
 Puan Maharani	14.274
 Luhut Binsar Panjaitan	13.394
 Juliari Peter Batubara	13.258
 Azis Syamsuddin	11.995
 Arteria Dahlan	11.995
 Megawati Soekarnoputri	11.542
 Lamhot Sinaga	11.357
 Ichsan Soelistio	11.071

Pada analisis sebelumnya, Luhut Binsar memiliki relasi yang paling banyak sehingga sangat berpotensi untuk mempercepat penyebaran informasi di dalam jaringan. Analisis keperantaraan menunjukkan bahwa **Sandiaga Uno** memiliki nilai paling tinggi, artinya Sandiaga memiliki kendali yang besar atas informasi yang mengalir di dalam jaringan tersebut. Sandiaga dapat menjadi jembatan kunci dalam jaringan atau bisa jadi titik tunggal potensi kegagalan. Ketika aktor menyadari bahwa dirinya memiliki banyak informasi dari berbagai aktor yang tidak terhubung, maka ada kemungkinan aktor akan memanipulasi informasi untuk kepentingan dirinya maupun kelompok aktor tertentu [29]. Akan tetapi, apabila melihat karakter jaringan yang relasinya relatif kuat dan masif, maka posisi Sandiaga Uno cenderung akan memperkuat atau bahkan memperluas jaringan oligarki yang ada. Sandiaga Uno memang tidak terlibat langsung dalam perumusan UUCK, tetapi *track record*-nya sebagai pejabat negara yang terafiliasi dengan partai Gerindra, pengusaha di sektor tambang dan energi, serta mantan petinggi KADIN dan HIPMI [30], membuatnya memiliki relasi yang luas dengan berbagai aktor dari kelompok yang berbeda.

Puan Maharani dan Agus Gumiwang memiliki nilai keperantaraan yang sama. **Agus Gumiwang** pernah menduduki berbagai jabatan fungsional yang strategis, mulai dari anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Menteri [31]. Aktor ini juga menjadi pembentuk relawan Jokowi-JK di Jawa Barat. Pengalaman di berbagai jabatan fungsional dan perannya sebagai pembentuk relawan tentu memberinya peluang untuk berelasi dengan berbagai aktor dari berbagai latar belakang, sehingga Agus sangat berpotensi untuk menjadi perantara diantara para aktor yang berbeda. **Puan Maharani** yang merupakan ketua DPR memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi perantara bagi aktor lain. Tugas DPR dalam merumuskan dan mengesahkan kebijakan publik bisa menjadi sarana bagi Puan Maharani untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang melakukan modus *state capture* melalui produk kebijakan [32].

Luhut Binsar yang memiliki nilai *degree* relasi antar aktor tertinggi sekaligus aktor yang paling banyak terafiliasi dengan perusahaan menduduki nilai keperantaraan tertinggi yang keempat. Hal ini menunjukkan bahwa Luhut juga banyak berperan sebagai perantara antar aktor dalam jaringan. Latar belakang TNI, pengusaha, sekaligus aktor yang paling banyak menduduki jabatan politik membuat Luhut memiliki banyak relasi dengan berbagai aktor yang berbeda. Berbeda halnya dengan **Juliari Peter Batubara** yang pernah menjabat sebagai Menteri [27]. Juliari yang tergabung di KADIN dan berperan sebagai tim sukses Jokowi [28], mampu membentuk relasi dengan aktor lain yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga sangat berpotensi sebagai perantara.

Azis Syamsudin dan Arteria Dahlan memiliki nilai keperantaraan yang sama. **Arteria Dahlan** yang menjadi anggota PANJA UUCK [23] akan terhubung dengan berbagai aktor yang berbeda di dalam jaringan oligarki ini, sehingga Arteria sangat berpotensi menjadi perantara diantara

para aktor. Keterlibatan **Lamhot Sinaga** dan **Ichsan Soelistio** dalam perumusan UUCK [6], juga menjadi peluang bagi mereka untuk terkoneksi dengan berbagai aktor, terutama Lamhot yang masih menjadi anggota DPR aktif.

Megawati Soekarnoputri yang merupakan petinggi PDIP dan pernah menjabat sebagai presiden tentu memiliki banyak relasi dengan berbagai aktor yang berbeda. Meskipun sudah lama tidak menduduki jabatan fungsional yang strategis, tetapi kepentingannya dapat disalurkan melalui anaknya Puan Maharani dan Presiden Jokowi [20]. Kondisi ini menyebabkan Megawati masih berpotensi untuk menjadi perantara diantara para aktor dengan latar belakang berbeda. Selain itu, dilantikannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN [19], menunjukkan bahwa politikus mulai memperluas ranahnya ke dunia penelitian. Hal ini tentu akan memperkuat posisi Megawati sebagai perantara diantara aktor yang berbeda latar belakang maupun kepentingannya.

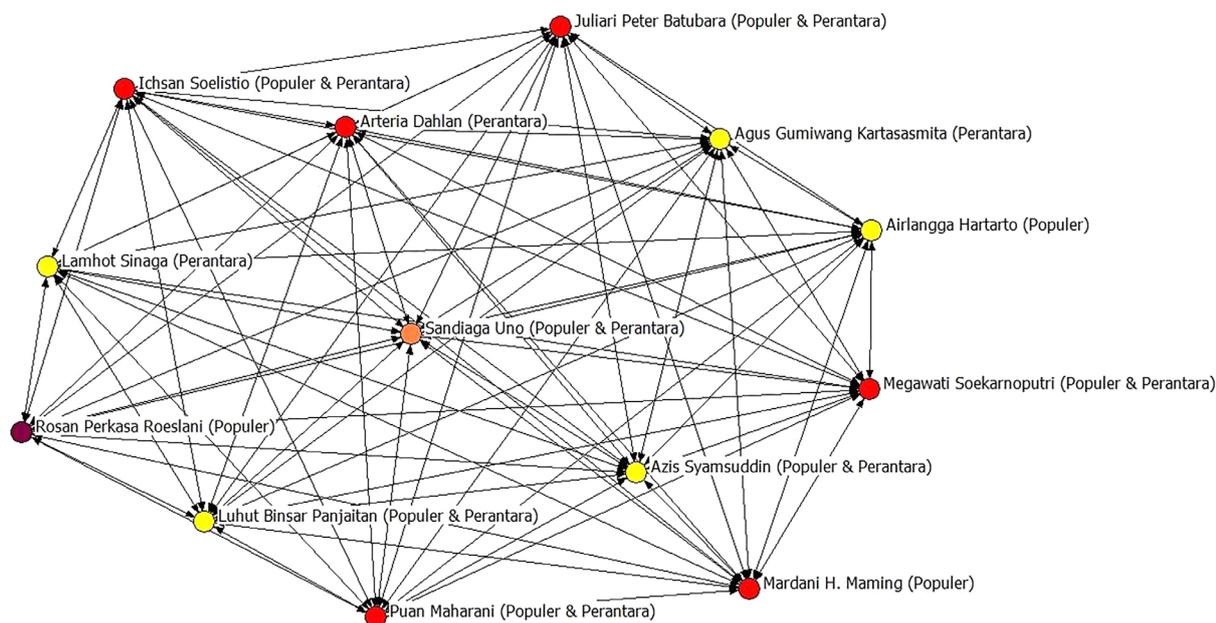
■ Aktivist Greenpeace Indonesia membentangkan banner pada aksi bersama koalisi untuk menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kontroversial, berlokasi di depan Gedung DPR RI Jakarta. 28 Februari 2023.

© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace



Analisis sentralitas pada jaringan oligarki menunjukkan bahwa aktor kuat⁴ tersebar di beberapa PEP yang berbeda. Terdapat aktor yang populer karena memiliki banyak relasi, aktor yang berperan sebagai perantara, dan keduanya. Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 aktor yang kuat berdasarkan nilai tingkatan dan atau nilai keberantaraan yang paling tinggi. Aktor-aktor kuat didominasi oleh kader partai PDI dan Golkar. Hubungan diantara aktor kuat tersebut disajikan pada Gambar 8. Warna node mewakili afiliasi partai dan keterangan label mewakili kekuatan aktor berdasarkan kemampuannya menjadi perantara dan jumlah relasi yang tinggi. Analisis jaringan ini menunjukkan bahwa struktur hierarkis tidak bisa menggambarkan kekuatan aktor dalam sistem oligarki di sektor tambang dan energi.

Presiden yang secara hierarkis memiliki kedudukan tertinggi ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan aktor yang lainnya. Kebijakan UUCK merupakan hasil dari jaringan oligarki yang beranggotakan PEP sekaligus pengusaha yang berinteraksi satu sama lain secara masif dan intens. Aktor yang berpotensi sebagai perantara sangat memungkinkan memperluas jaringan oligarki dengan menambah keterlibatan pengusaha di dunia politik atau bahkan muncul PEP baru yang berlatar belakang pengusaha. Aktor yang populer atau yang memiliki banyak relasi akan memastikan kebijakan seperti UUCK dapat diimplementasikan dengan baik untuk memenuhi kepentingan golongan tertentu.



Gambar 8. Jaringan aktor dengan nilai tingkatan dan atau keberantaraan tertinggi pada sektor tambang dan energi

4 Aktor kuat berdasarkan nilai *degree* dan *betweenness* yang tinggi

3.2 Analisis Jaringan Sosial (SNA) pada Sektor Perkebunan

Keterlanjuran kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan menjadi polemik yang berkepanjangan bagi sektor kehutanan maupun sektor perkebunan. Terdapat beberapa pasal di dalam UUCK yang membahas mengenai keterlanjuran kelapa sawit dalam kawasan hutan. Pasal 110 A dan Pasal 110 B lebih mengutamakan sanksi administratif dan tidak ada pidana untuk menyelesaikan masalah kebun sawit di kawasan hutan. Bagi pengusaha sawit, pasal ini sangat menguntungkan karena mereka dapat melakukan pemutihan wilayah perkebunan mereka dengan lebih mudah. Akan tetapi, pasal di dalam UUCK ini dinilai akan mengaburkan perbuatan yang melanggar dalam penerbitan izin dalam kawasan hutan sehingga berpotensi melemahkan penegakan hukum dan memperburuk kondisi lingkungan.

Terdapat beberapa pengusaha maupun PEP yang terlibat dalam perumusan UUCK juga memiliki perkebunan sawit. Selain itu, terdapat pengusaha dan PEP yang juga memiliki perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Aktor yang terlibat dalam

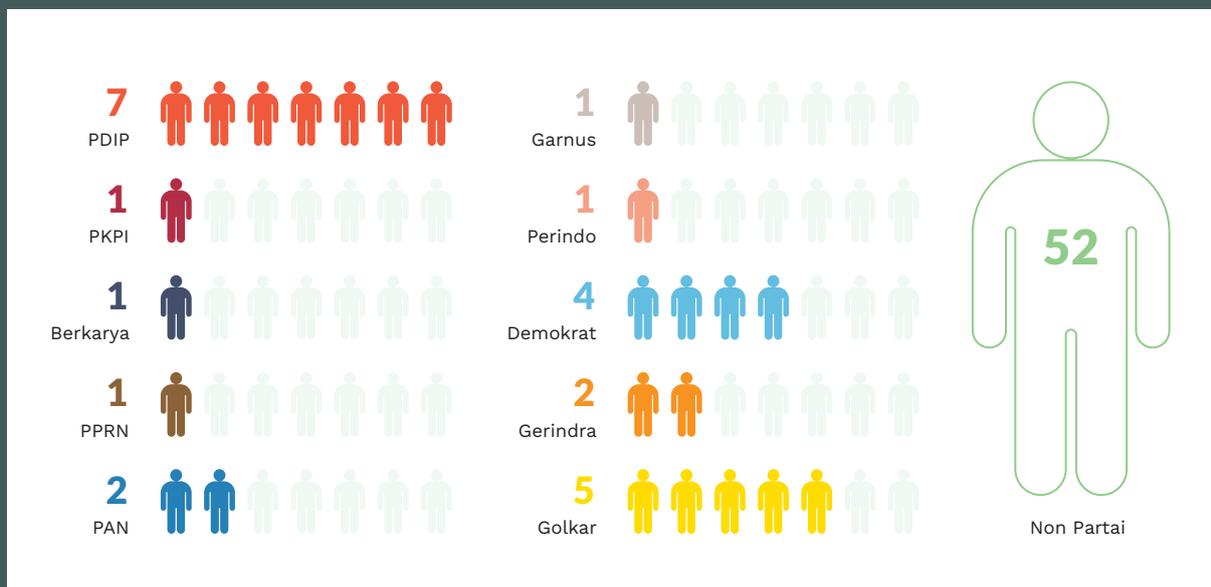
proses UUCK dan aktor-aktor yang memiliki perkebunan sawit di dalam kawasan hutan membentuk suatu relasi yang menguntungkan satu sama lain. Relasi tersebut dibentuk oleh berbagai konteks seperti relasi keluarga, relasi partai, anggota keluarga, memiliki kedudukan di perusahaan maupun institusi yang sama. Oleh karena itu, pada studi ini analisis jaringan aktor sangat diperlukan untuk memahami siapa sesungguhnya aktor yang terhubung ke perkebunan kelapa sawit, sekaligus siapakah aktor yang paling kuat berdasarkan posisi strukturalnya dalam jaringan oligarki.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 77 aktor berafiliasi dengan lebih dari 80 perkebunan sawit dan 18 group perusahaan. Aktor-aktor yang memiliki perusahaan sawit dalam kawasan hutan didominasi oleh aktor yang tidak terafiliasi dengan partai manapun (Gambar 9). Apabila dibandingkan dengan sektor tambang, aktor-aktor yang terafiliasi dengan partai cenderung menyebar di banyak partai dan masih didominasi oleh partai PDIP dan Golkar.

■ Perbukitan yang mengalami deforestasi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, di wilayah konsesi PT Buana Adhitama, anak perusahaan PT Sinar Mas, Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. 1°51'35.3"S, 112°31'51.2"E, 26 April 2010.



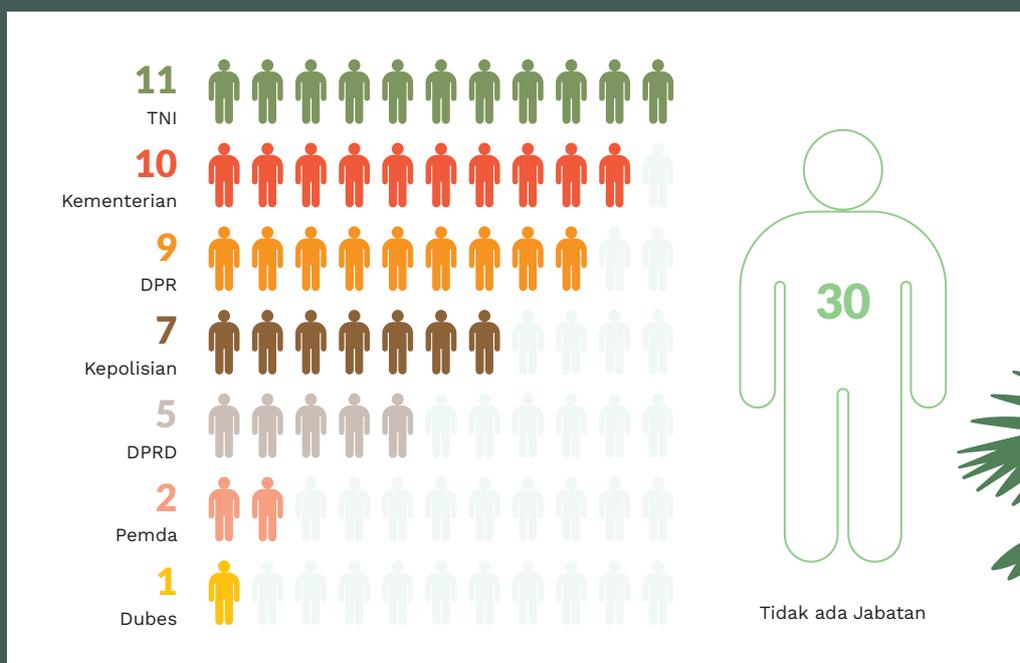
3.2.1 Atribut aktor dalam jaringan oligarki pada sektor perkebunan



Gambar 9. Kategori aktor di sektor perkebunan sawit berdasarkan keanggotaannya dalam partai

Aktor-aktor yang terdapat di dalam relasi ini terdiri dari aktor yang memiliki jabatan fungsional dan aktor yang tidak memiliki jabatan. Aktor yang memiliki jabatan fungsional adalah aktor-aktor yang pernah menduduki

jabatan tersebut atau aktor yang sedang menduduki jabatan tersebut (aktif). Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor yang terafiliasi dengan perusahaan merupakan PEP yang tersebar di berbagai kategori (Gambar 10).

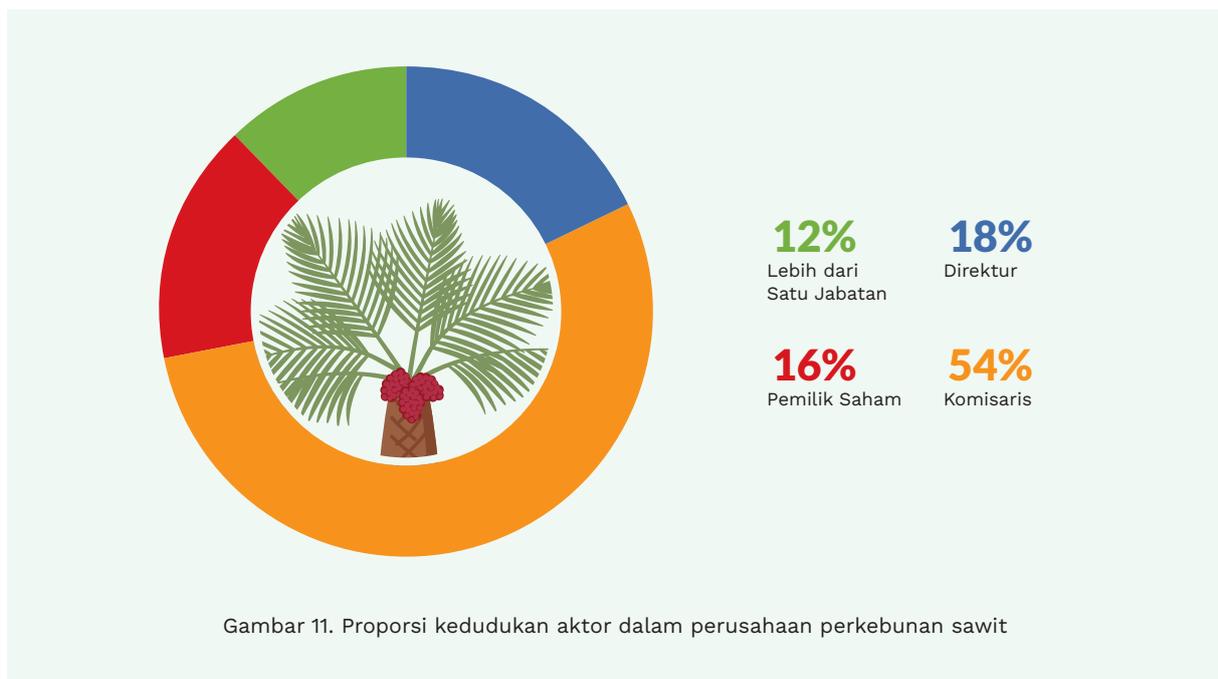


Gambar 10. Kategori aktor di sektor perkebunan sawit berdasarkan jabatannya

Kategori TNI merupakan PEP yang pernah atau sedang menjabat di kesatuan TNI dan belum pernah menduduki jabatan fungsional di kategori lainnya. Kategori Kementerian merupakan PEP yang terdiri dari Menteri, staf khusus, dan PEP yang bertugas di lembaga negara lainnya yang setara dengan kementerian (misalnya, BPJS yang bertanggung jawab kepada Presiden). Kategori Kepolisian merupakan PEP yang pernah memiliki kedudukan di kesatuan Kepolisian dan belum pernah menduduki jabatan fungsional di kategori lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa PEP yang terafiliasi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit berasal dari TNI. Di masa lalu, usaha TNI ditopang korporatisme negara yang kuat dan TNI menjadi bagian dari usaha untuk berburu *rente*. Konsep jalan tengah menjadi alasan semakin kuatnya TNI masuk ke dalam ruang politik dan ekonomi di masa Orde Baru [33]. Meskipun telah keluar UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan larangan berbisnis, nampaknya hanya akan mengarahkan pada perubahan pemodal dari aset serta perubahan penggiat dan personal yang bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Aktor dalam jaringan oligarki yang terafiliasi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagian besar berperan sebagai komisaris (Gambar 11). Kondisi ini sama dengan aktor yang terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi, bahkan di sektor perkebunan aktor yang menduduki jabatan sebagai komisaris lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa aktor-aktor (baik itu PEP maupun yang tidak memiliki jabatan fungsional) yang terlibat dalam jaringan oligarki ini adalah aktor yang memiliki peran penting di perusahaan. Keberadaan komisaris memiliki peranan penting karena mengendalikan dan mengawasi kinerja dari perusahaan dan menjaga kepentingan pemegang saham [12]. Lebih daripada itu, komisaris juga dapat menentukan strategi dan pengambilan keputusan perusahaan [34]. Oleh karena itu, seperti penjelasan di sub-bab sebelumnya bahwa ketika komisaris memiliki hubungan politik maka berbagai urusan perusahaan yang berkaitan dengan aturan negara dapat diatasi dan mendatangkan dampak positif bagi perusahaan.

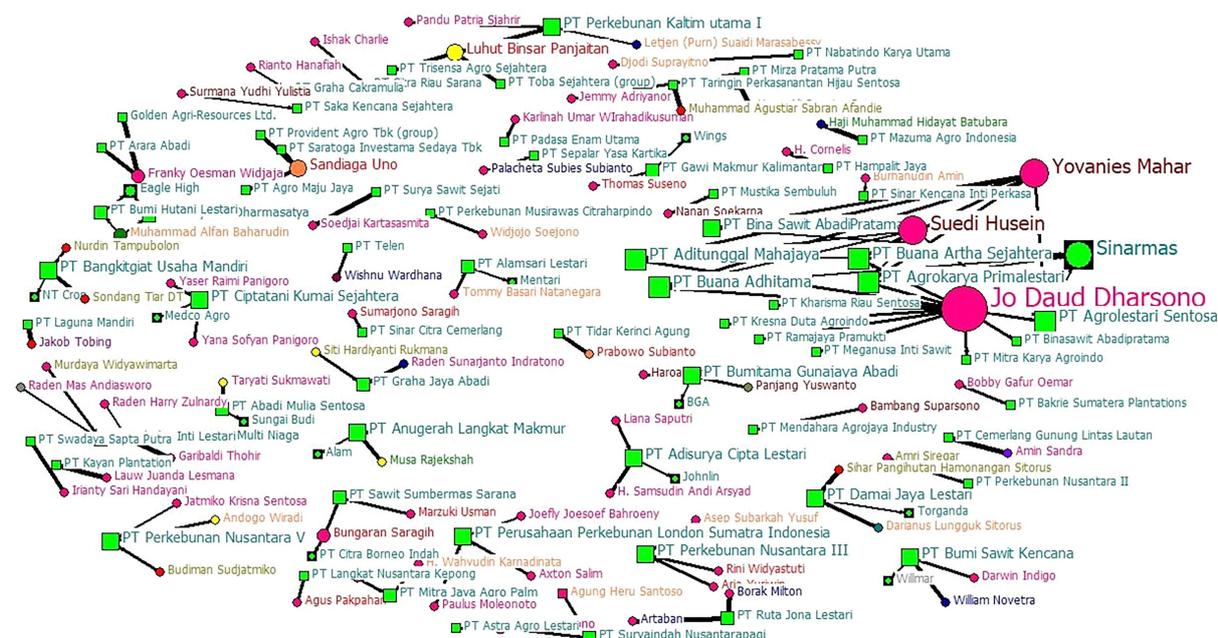


3.2.2 Aktor yang terafiliasi dengan perkebunan sawit dalam kawasan hutan

Hasil analisis SNA menunjukkan bahwa setiap aktor terhubung langsung dengan perusahaan kelapa sawit dan terdapat beberapa aktor yang saling terhubung di perusahaan yang sama. Gambar 12 memberikan visualisasi hubungan antara aktor dengan perusahaan, serta menunjukkan beberapa aktor yang memiliki kedudukan di perusahaan yang sama.

Node yang berbentuk lingkaran mewakili aktor, node berbentuk lingkaran dalam bujur sangkar mewakili group, dan node berbentuk bujur

sangkar mewakili perusahaan. Node dan label yang lebih besar mewakili aktor dengan jumlah koneksi yang lebih tinggi, baik itu koneksi ke perusahaan maupun dengan aktor lainnya dalam perusahaan yang sama. Warna pada node menunjukkan atribut partai dari masing-masing aktor, sehingga lingkaran dengan warna yang sama artinya aktor berasal dari partai yang sama. Warna pada label menunjukkan atribut jabatan fungsional dari masing-masing aktor, sehingga warna label yang sama artinya aktor tersebut memiliki jabatan yang sama.



Gambar 12. Jaringan aktor dengan perkebunan sawit

Keterangan:

Bentuk node	Warna Node	Warna Label
○ Aktor	● PDI	● Kementerian
□ Perusahaan	● Golkar	● TNI
■ Group	● Non Party	● Non jabatan
	● Gerindra	● Kepolisian
	● Demokrat	● Perusahaan/ Group
	● PAN	
	● Perind	● DPR
	● Garnus	● DPRD
	● Berkarya	● Dubes
	● PKPI	
	● Perusahaan/ Group	● Pemda

Tabel 5. Aktor dengan nilai *degree* tertinggi dalam jaringan relasi aktor dengan perusahaan

Aktor	Degree
 Jo Daud Dharsono	22.00
 Yovianes Mahar	12.00
 Sandiaga Uno	9.00
 Luhut Binsar Panjaitan	9.00
 Franky Oesman Widjaja	7.00
 Suedi Husein	6.00
 Soedjai Kartasasmita	4.00
 Sihar Pangihutan Hamonang	4.00
 Muhammad Agustiar Sabran	4.00
 Lauw Juanda Lesmana	4.00

Aktor yang paling banyak terkoneksi dengan perusahaan adalah Jo Daud Dharsono dengan nilai *degree* sebesar 22 (Tabel 5). Nilai *degree* ini menggambarkan jumlah dan kekuatan koneksi yang dimiliki oleh seorang aktor. Pada jaringan ini, nilai *degree* menggambarkan perusahaan mana saja yang terafiliasi dengan aktor, bukan menggambarkan hubungan antar aktor itu sendiri. Apabila aktor banyak terafiliasi dengan perusahaan dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam sebuah perusahaan tersebut, maka akan menghasilkan nilai *degree* yang tinggi.

Jo Daud Dharsono merupakan pengusaha yang paling banyak memiliki perusahaan dengan jumlah 11 perusahaan dan berkedudukan sebagai komisaris. Diantara 11 perusahaan tersebut, enam diantaranya terhubung dengan **Suedi Husein** dan **Yovianes Mahar**. Perusahaan tersebut yaitu PT Aditunggal Mahajaya, PT Agrokarya Primalestari, PT Agrolestari Sentosa, PT Bina Sawit Abadi Pratama, PT Buana Adhitama, dan PT Buana Artha Sejahtera. Pada keenam perusahaan tersebut, Yovianes memiliki kedudukan yang sama dengan Jo Daud yaitu sebagai komisaris, sedangkan Suedi berkedudukan sebagai direktur. Oleh karena itu, nilai *degree* dari Suedi berada di bawah kedua aktor tersebut. Seluruh perusahaan yang terkoneksi dengan Jo Daud, Suedi, dan Yovianes merupakan anak perusahaan dari grup Sinarmas.

Fakta ini menunjukkan bahwa lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit dibawah grup sinarmas banyak yang terletak di dalam kawasan hutan dibandingkan dengan grup yang lainnya. Empat perusahaan sawit yang terkoneksi dengan ketiga aktor diatas dikonfirmasi memiliki sertifikat RSPO, yaitu PT Aditunggal Mahajaya, PT Agrokarya Primalestari, PT Agrolestari Sentosa, dan PT Bina Sawit Abadi Pratama [35]. Perusahaan yang memperoleh sertifikat RSPO seharusnya sudah *clear* mengenai legalitas kawasan, tetapi fakta menunjukkan bahwa perusahaan yang mengantongi sertifikat tersebut terletak di dalam kawasan hutan.



© Greenpeace

■ Tampak indikasi baru terjadinya pembukaan lahan HCS (High Carbon Stock), untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, di konsesi PT Aditunggal Mahajaya (PT ATM), anak perusahaan Golden Agri Resources (GAR) di Kalimantan Tengah. 2°5'0.48"S, 112°11'53.76"E. 05 Juni 2014.

Sandiaga Uno dan **Luhut Binsar Panjaitan** juga termasuk dalam kategori aktor dengan nilai *degree* yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua PEP tersebut tidak hanya banyak terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi tapi juga perkebunan sawit. Sandiaga memiliki tiga perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit yaitu PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT Provident Agro Tbk (group), dan PT Agro maju

Jaya. Pada sektor perkebunan sawit ini, Sandiaga tidak terhubung dengan aktor lain di perusahaan yang sama. **Luhut Binsar Panjaitan** memiliki tiga perusahaan yang sektor perkebunan yaitu PT Toba Sejahtera (group), PT Perkebunan Kaltim Utama I, dan PT Trisensa Agro Sejahtera. Luhut juga terhubung dengan keponakannya Pandu Patria Sjahrir dan Letjen (Purn) Suaidi di perusahaan PT Perkebunan Kaltim Utama I.

3.2.3 Struktur relasional aktor dalam jaringan aktor pada sektor perkebunan

Analisis jaringan sosial diantara para aktor yang memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit mampu untuk mengidentifikasi bagaimana relasi antar aktor yang terjalin dapat mendorong suatu jaringan tersebut berfungsi. Hubungan yang terbentuk diantara para aktor tidak sebatas pada hubungan bisnis di perkebunan sawit yang sama, tetapi konteks relasi lain yang sudah terbentuk sebelumnya. Jaringan yang terbentuk diantara para aktor yang terlibat didasari oleh hubungan keluarga, relasi dalam partai, kedudukan dalam berbagai institusi termasuk organisasi pengusaha di sektor kelapa sawit, tim sukses calon presiden, dan jabatan fungsional. Dalam studi ini, apabila relasi diantara aktor didasari oleh lebih dari satu hubungan, maka relasi diantara aktor tersebut semakin kuat.

Terdapat beberapa nama aktor yang ada di jaringan ini juga ada di jaringan relasi aktor yang terafiliasi dengan perusahaan di sektor tambang, antara lain Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Pandu Patria Sjahrir, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, dan Bobby Gafur Oemar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Luhut, Prabowo, dan Sandiaga termasuk PEP yang paling banyak terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi. Letjen (Purn) Suaidi memiliki hubungan yang kuat dengan Prabowo di berbagai perusahaan termasuk di perkebunan sawit. Pandu Patria dan Bobby Gafur yang bertugas sebagai Satgas Omnibus Law terlibat aktif dalam proses penyusunan UUCK.

Statistik deskriptif dapat memberikan pemahaman tentang gambaran struktur jaringan secara keseluruhan. Hasil analisis ini menunjukkan jaringan relasi diantara aktor yang terafiliasi dengan perkebunan sawit cukup masif, ditunjukkan dengan jumlah relasi yang terbentuk hingga ribuan dengan aktor yang berjumlah 77 orang. Akan tetapi, jaringan ini tidak lebih masif jika dibandingkan dengan jaringan relasi aktor yang terlibat dalam proses perumusan Omnibus Law dan aktor lainnya yang terafiliasi

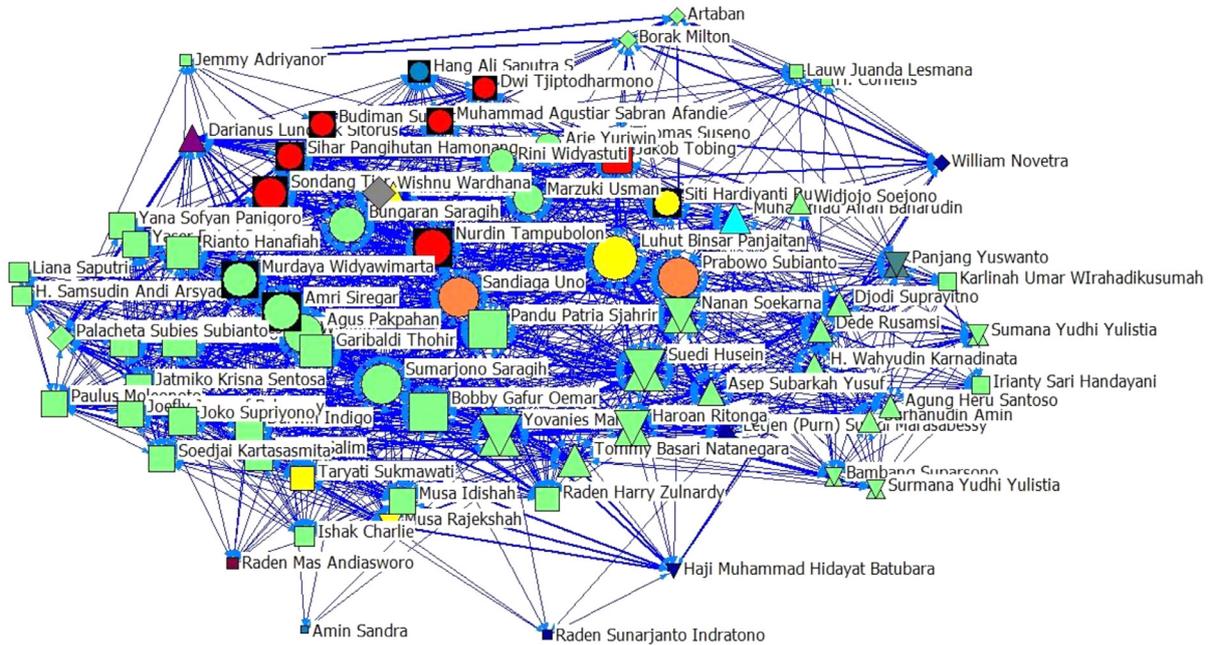
dengan perusahaan tambang dan energi. Jaringan ini juga kurang terkonsolidasi dengan baik, sebagaimana tercermin dalam skor kepadatan yang relatif rendah. Angka kepadatan bergerak dari 0 hingga 1, dimana semakin mengarah ke 1 berarti semakin padat suatu jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% aktor yang ada di dalam jaringan saling berinteraksi satu sama lain.

Tabel 6. Statistik deskriptif jaringan relasional aktor pada sektor perkebunan sawit

Statistik deskriptif	Jaringan
Jumlah Aktor	77
Jumlah Relasi	2.470
Kepadatan Jaringan	0,422
Diameter	3
Kedekatan	0,61

Jaringan relasional ini juga tidak menunjukkan adanya struktur hierarkis dalam jaringan. Hal ini ditunjukkan dengan angka kedekatan yang lebih dari 0,5 dan ukuran diameter yang relatif rendah. Diameter adalah ukuran yang menunjukkan jarak terjauh di antara dua aktor supaya bisa berinteraksi. Suatu jaringan dengan diameter 3, artinya jarak terjauh (maksimal) aktor dalam jaringan bisa berinteraksi satu sama lain yaitu dengan diperantarai oleh 3 aktor lain.

Gambar 14 memberikan visualisasi hubungan tingkatan, yaitu ukuran yang menunjukkan aktor dengan jumlah relasi yang paling banyak dan paling kuat dibandingkan dengan aktor yang lainnya. Hubungan yang lebih kuat ditunjukkan dengan garis yang lebih tebal. Node dan label yang lebih besar mewakili aktor dengan jumlah koneksi yang lebih tinggi. Gambar 14 juga menyoroti aktor yang berasal dari partai yang sama memiliki warna node yang sama dan aktor dengan jabatan fungsional yang sama memiliki bentuk node yang sama.



Gambar 14. Sentralitas tingkatan jaringan aktor pada sektor perkebunan sawit

Keterangan:

Warna Node			Bentuk Node	
● PDI	● PPRN	● Demokrat	○ Menteri	▽ Pemda
● Golkar	● Perindo	● PAN	□ Non jabatan	◇ DPRD
● Non partai	● Garnus	● Berkarya	○ Dubes	□ DPR
● Gerindra	● PKPI		△ TNI	⊠ Kepolisian

Apabila dilihat dari struktur jaringannya, aktor-aktor yang memiliki jumlah dan kekuatan relasi yang tinggi berada di bagian tengah jaringan dan aktor dengan jumlah dan kekuatan relasi yang rendah berada di tepi jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktur jaringan sangat bergantung dengan aktor yang memiliki relasi yang banyak dan kuat. Aktor yang memiliki jabatan yang sama cenderung memiliki jarak yang dekat satu sama lain, begitu juga dengan aktor yang tidak memiliki jabatan politik memiliki jabatan yang dekat satu sama lain. Bagian kiri jaringan didominasi oleh aktor pengusaha-pengusaha yang tidak terafiliasi dengan partai manapun, sedangkan bagian kanan jaringan didominasi oleh aktor-aktor

yang merupakan anggota TNI dan Kepolisian. Jumlah aktor yang tidak terafiliasi dengan partai cenderung menyebar ke seluruh jaringan, artinya para pengusaha ini masuk ke berbagai konteks relasi dan berelasi dengan PEP yang ada di dalam jaringan.

Hubungan utama dari Gambar 14 ditampilkan pada Tabel 7, yang memberi peringkat 10 aktor yang paling banyak dan paling kuat relasinya dalam jaringan. Aktor dengan nilai *degree* yang besar sangat berpotensi/berperan dalam menyebarkan informasi dan memengaruhi aktor lain dalam jaringan karena dapat menjangkau sejumlah besar aktor dan arus informasi di seluruh jaringan.

Tabel 7. Aktor dengan derajat tingkatan tertinggi dalam jaringan aktor di sektor perkebunan sawit

Aktor	Degree
 Luhut Binsar Panjaitan	74.00
 Sandiaga Uno	73.00
 Sumarjono Saragih	63.00
 Nurdin Tampubolon	62.00
 Pandu Patria Sjahrir	60.00
 Bobby Gafur Oemar	59.00
 Prabowo Subianto	58.00
 Suedi Husein	57.00
 Yovianes Mahar	56.00
 Sondang Tiar DT	56.00

Luhut Binsar Panjaitan merupakan aktor dengan nilai *degree* tertinggi, artinya Luhut merupakan aktor sentral karena memiliki banyak relasi dengan aktor lain yang memiliki usaha perkebunan sawit. Luhut dapat memiliki nilai *degree* yang tinggi karena memiliki koneksi dengan keluarganya **Pandu Patria Sjahrir** dan Letjen (Purn) Suaidi. Selain itu, anggota TNI merupakan aktor yang paling banyak memiliki perkebunan sawit dalam kawasan hutan sehingga Luhut yang juga merupakan mantan anggota TNI memiliki banyak relasi di jaringan ini. Sejarah menunjukkan bahwa, setelah Indonesia merdeka hingga saat ini netralitas politik TNI hampir tidak pernah terwujud sepenuhnya bahkan TNI lebih mirip institusi politik daripada militer [36].

Sandiaga Uno merupakan aktor kedua dengan nilai *degree* tertinggi karena banyak aktor di jaringan ini yang tergabung dalam organisasi bisnis yang sama dengan Sandiaga, yaitu KADIN dan HIPMI [30]. **Nurdin Tampubolon** memiliki kedudukan di satu perusahaan sawit di dalam kawasan hutan bersama dengan anaknya **Sondang Tiar Tampubolon**. Perjalanan Nurdin dan anaknya sebagai politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPR pada tahun 2009-2014 tentu banyak memiliki relasi dengan PEP lainnya [37]. Selain itu, Nurdin merupakan mantan wakil ketua KADIN, sehingga Nurdin memiliki banyak koneksi dengan pengusaha lainnya dari institusi yang sama.

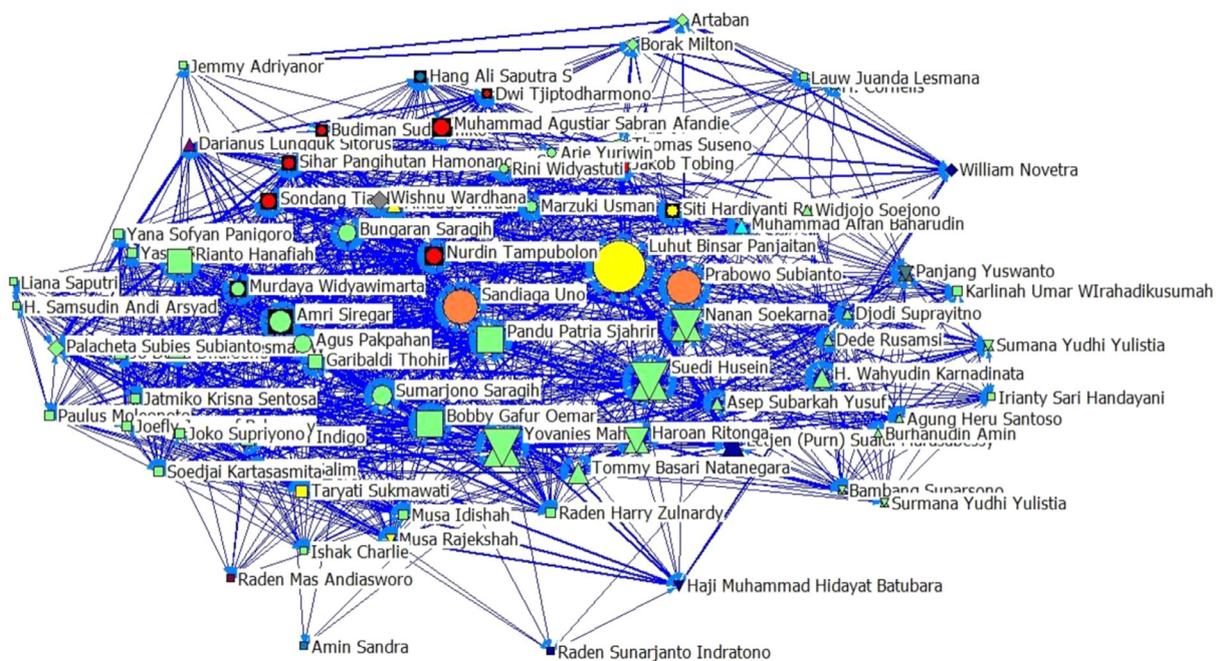
Sumarjono Saragih merupakan pengusaha yang memiliki kedudukan di APINDO Sumsel [38], KADIN Sumsel [39], dan GAPKI [40]. Posisi pentingnya diberbagai organisasi pengusaha tersebut membuat Sumarjono memiliki banyak relasi dengan pengusaha lain terutama di sektor perkebunan sawit. Sumarjono juga merupakan pendiri sekaligus pemimpin relawan pengusaha sawit pendukung Jokowi-Ma'ruf saat menjelang Pemilu 2019. Posisi ini membuatnya banyak terhubung dengan relawan dan Tim Kemenangan Jokowi yang lainnya. Sama halnya dengan Sumarjono, **Bobby Gafur Oemar** juga dapat memiliki banyak relasi karena posisi pentingnya di KADIN [41] dan menjadi salah satu deklarator

pengusaha pendukung Jokowi disaat menjelang pemilu. **Prabowo Subianto** adalah salah satu PEP yang menjabat sebagai Menteri dan merupakan mantan anggota TNI. Prabowo dapat memiliki nilai *degree* yang tinggi di sektor perkebunan karena memiliki relasi dengan anggota TNI lainnya yang mendominasi dalam jaringan ini. Selain itu, sebelum memiliki partai Gerindra Prabowo terafiliasi dengan partai Golkar, sehingga Prabowo memiliki relasi yang dekat dengan aktor-aktor dari partai tersebut.

Suedi Husein dan **Yovianes Mahar** merupakan anggota Kepolisian dan mereka sama-sama pernah menjabat sebagai Kapolda di wilayah Sumatera. Suedi pernah menjabat sebagai Kapolda Riau periode 2010-2013 dan saat ini menjabat sebagai Kabid Organisasi di Polri Pusat [42]. Yovianes Mahar pernah menjabat sebagai Kapolda Bangka Belitung pada tahun 2016 dan Kapolda Bengkulu pada akhir 2016 sampai 2017. Jabatan Yovianes saat ini adalah staf ahli manajemen Kapolri [43]. Dua anggota polisi ini memiliki kedudukan penting di banyak perkebunan sawit di dalam kawasan hutan.

Suedi Husein terhubung ke delapan perusahaan dan memiliki kedudukan sebagai Direktur, sedangkan Yovianes terhubung ke 11 perusahaan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi yaitu Komisaris. Kedua aktor ini terhubung di enam perusahaan yang sama yang dinaungi oleh Sinarmas group bersama dengan pengusaha Jo Dharsono. Oleh karena itu, aktor ini memiliki nilai *degree* yang tinggi jika dibandingkan dengan aktor yang lainnya.

Gambar 15 memberikan visualisasi hubungan keperantaraan, yaitu ukuran yang berapa kali seorang aktor berperan sebagai jembatan diantara dua aktor/ kelompok aktor yang terputus. Node dan label yang lebih besar mewakili aktor yang banyak berperan sebagai perantara di dalam jaringan tersebut. Hubungan utama dari Gambar 15 ditampilkan pada Tabel 8, yang memberi peringkat 10 aktor yang paling banyak berperan sebagai perantara. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor yang memiliki nilai keperantaraan yang tinggi sama dengan aktor yang memiliki nilai tingkatan yang tinggi.



Gambar 15. Sentralitas keperantaraan jaringan aktor pada sektor perkebunan sawit

Tabel 8. Aktor dengan derajat keberantaraan tertinggi dalam jaringan aktor di sektor perkebunan sawit

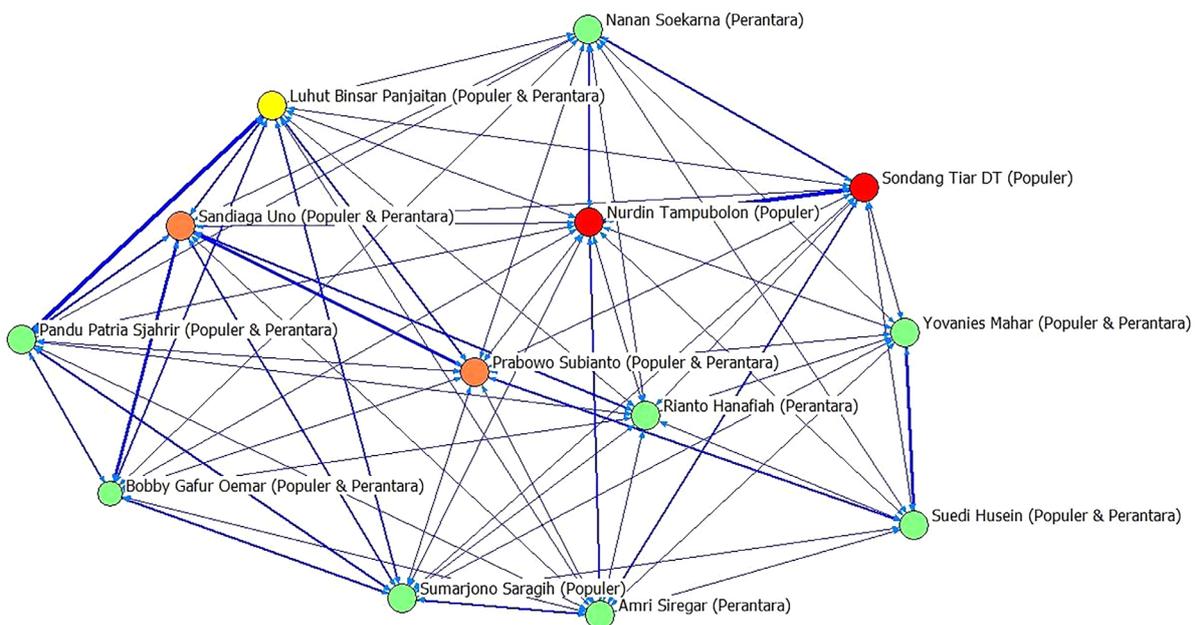
Aktor	Betweenness
 Luhut Binsar Panjaitan	139.241
 Yovianes Mahar	93.22
 Suedi Husein	93.22
 Sandiaga Uno	85.67
 Prabowo Subianto	86.06
 Nanan Soekarna	70.02
 Pandu Patria Sjahrir	56.82
 Bobby Gafur Oemar	56.82
 Rianto Hanafiah	56.31
 Amri Siregar	53.49

Luhut Binsar Panjaitan menjadi aktor sentral di sektor perkebunan sawit karena memiliki nilai tingkatan dan nilai keberantaraan yang paling tinggi diantara seluruh aktor yang ada dalam jaringan. Luhut dapat mengendalikan jaringan yang ada karena perannya sebagai perantara diantara berbagai jenis aktor yang berbeda serta berpotensi untuk mempercepat penyebaran informasi di dalam jaringan. Luhut dapat menjadi jembatan kunci dalam jaringan dan berpotensi memperkuat atau bahkan memperluas jaringan oligarki yang ada. Perusahaan sawit yang terhubung dengan Luhut memang dikonfirmasi tidak terletak di dalam kawasan hutan, tetapi latar belakangnya sebagai anggota TNI dan menduduki berbagai jabatan fungsional membuatnya memiliki relasi yang luas dengan berbagai aktor dari kelompok yang berbeda. Begitu juga dengan **Prabowo Subianto** dengan latar belakang yang sama dengan Luhut, menjadikannya salah satu aktor yang paling banyak berperan sebagai perantara.

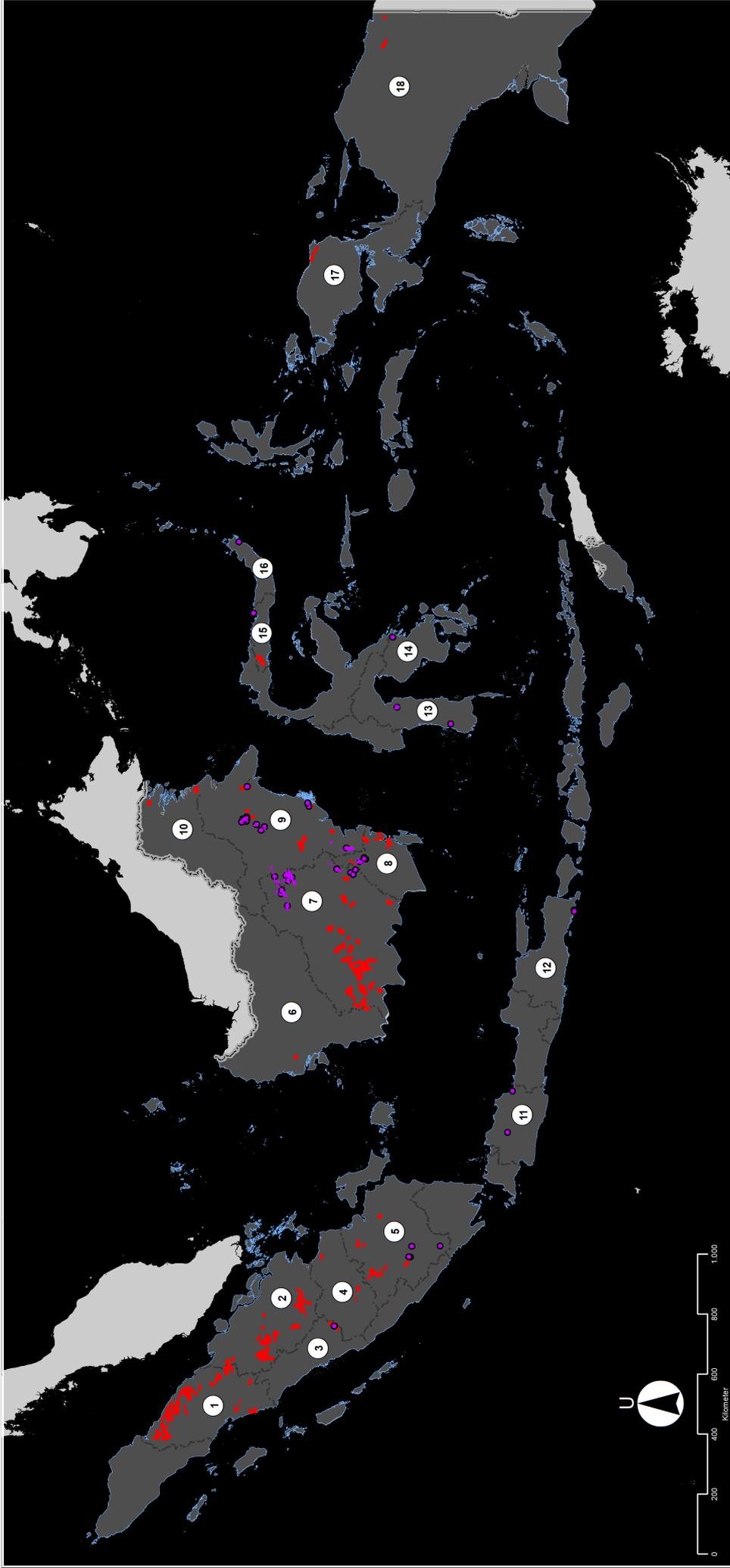
Yovianes Mahar dan **Suedi Husein** merupakan anggota Kepolisian yang memiliki nilai keberantaraan yang sama. Kedua aktor ini memang tidak tergabung ke organisasi pengusaha seperti yang lainnya, tetapi relasi mereka yang kuat dengan pengusaha Jo Daud Dharsono di beberapa perusahaan membuat kedua aktor tersebut sangat berpotensi menjadi penghubung diantara aktor yang berbeda. Aktor lain dengan nilai keberantaraan tinggi yang berasal dari kepolisian yaitu **Nanan Soekarna**. **Nanan Soekarna** pernah menduduki berbagai jabatan yaitu Kapolda Sumatera Utara dan Wakil Kepala Kepolisian Negara [44], serta terhubung dengan grup perusahaan besar yaitu Wilmar. Nanan juga pernah beberapa kali menjadi Ketua Umum IMI dan HDCI yang beranggotakan berbagai aktor termasuk pengusaha dan prajurit TNI-Polri [45].

Sandiaga Uno, Pandu Patria Sjahrir, dan Bobby Gafur Oemar yang merupakan mantan petinggi KADIN membuat mereka banyak memiliki relasi dengan pengusaha lain dari berbagai latar belakang. Sandiaga Uno yang memiliki pengalaman di beberapa jabatan publik membuatnya banyak terhubung dengan aktor yang duduk di kursi pemerintahan. Pandu Patria Sjahrir yang merupakan keponakan dari aktor sentral di jaringan ini juga memiliki jabatan sebagai ketua umum di APBI-ICMA yang merupakan asosiasi pertambangan batubara Indonesia dan APINDO [46]. Selain Pandu, **Rianto Hanafiah** merupakan pengusaha yang juga memiliki jabatan di APINDO. Rianto juga memiliki kedudukan di APINDO bersama dengan **Amri Siregar** yang merupakan calon anggota DPR RI periode 2019-2024.

Analisis sentralitas pada jaringan oligarki menunjukkan bahwa **Luhut Binsar Panjaitan** menjadi aktor sentral dalam jaringan oligarki di sektor perkebunan kelapa sawit. Terdapat aktor yang populer karena memiliki banyak relasi, aktor yang berperan sebagai perantara, dan keduanya. Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 aktor yang kuat berdasarkan nilai tingkatan dan atau nilai keperantaraan yang paling tinggi (Gambar 16). Warna node mewakili afiliasi partai dan keterangan label mewakili kekuatan aktor berdasarkan kemampuannya menjadi perantara dan jumlah relasi yang tinggi. Aktor-aktor kuat didominasi oleh pengusaha yang bukan merupakan kader partai dan memiliki jabatan di organisasi pengusaha seperti KADIN, GAPKI, dan APINDO.



Gambar 16. Jaringan aktor dengan nilai tingkatan dan atau keperantaraan tertinggi pada sektor perkebunan sawit



	Konsepsi perkebunan sawit yang dikuasai oligarki		Konsepsi tambang dan energi yang dikuasai oligarki		Provinsi
1.	Sumatera Utara	4.	Jambi	7.	Kalimantan Tengah
2.	Riau	5.	Sumatera Selatan	8.	Kalimantan Selatan
3.	Sumatera Barat	6.	Kalimantan Barat	9.	Kalimantan Timur
				10.	kalimantan Utara
				11.	Jawa Barat
				12.	Jawa Timur
				13.	Sulawesi Selatan
				14.	Sulawesi Tenggara
				15.	Gorontalo
				16.	Sulawesi Utara
				17.	Papua Barat
				18.	Papua



© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

- Puluhan boneka peraga dipasang untuk mewakili aktivis masyarakat yang tidak bisa menggelar aksi masa saat Pandemi Covid-19, di Gedung DPR RI di Jakarta. Greenpeace Indonesia mengadakan aksi kreatif menggunakan boneka peraga untuk menyampaikan pesan dari masyarakat kepada para anggota parlemen yang ingin mengesahkan RUU Omnibus Law. RUU yang kontroversial dan tentunya akan menghambat demokrasi, menggerus hak warga negara dan para pekerja. 29 Juni 2020.

3.3 Analisis Jaringan Sosial (SNA) dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Berbagai kelonggaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif bagi Indonesia yang tengah mengalami berbagai krisis lingkungan hidup. Secara umum UU Cipta Kerja dan Naskah Akademiknya telah melanggar asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan dalam naskah akademik dan kebutuhan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [47]. Tujuan awal dari para pembuat UUCK ini adalah ingin menyelesaikan masalah investasi untuk mendongkrak ekonomi, tetapi UUCK justru mengabaikan permasalahan penegakan hukum dan korupsi sebagai faktor krusial penghambat

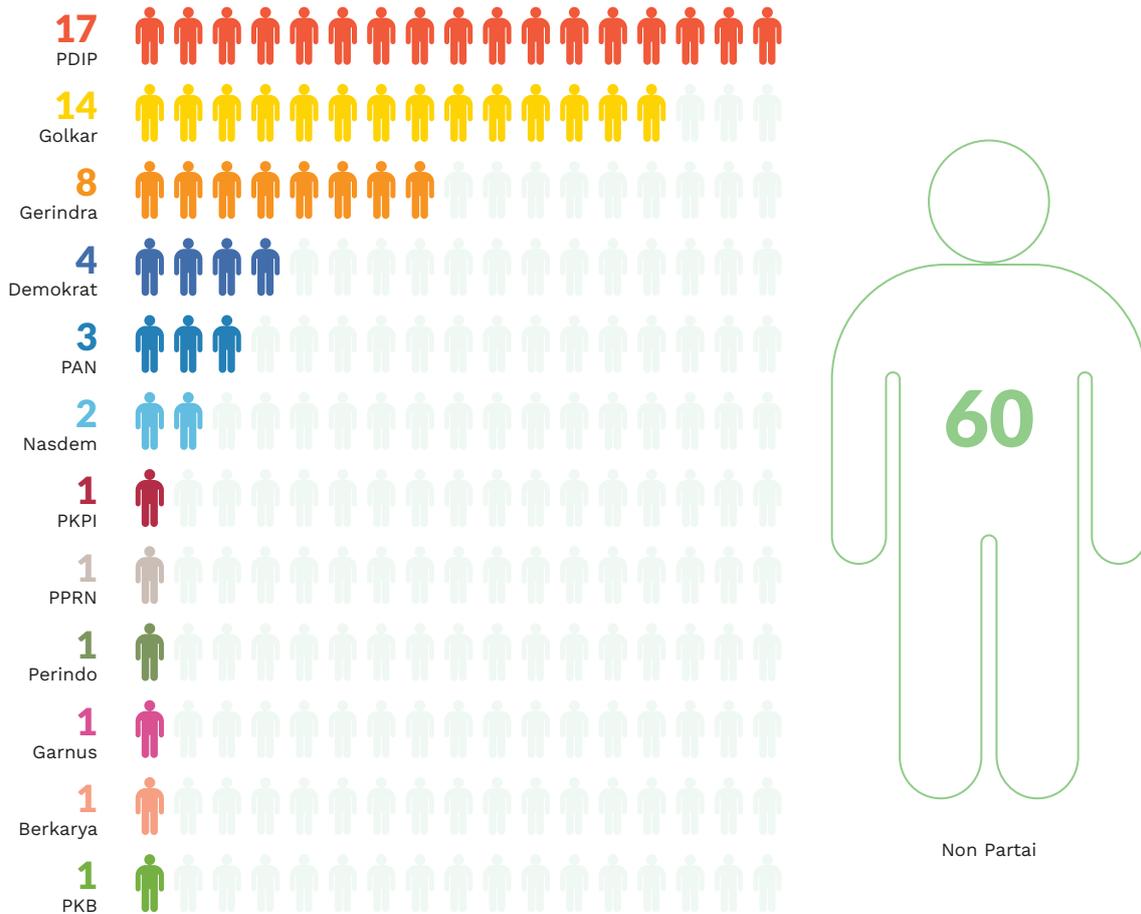
iklim investasi [48]. Dalam berbagai usaha berbasis sumber daya alam, UUCK yang sudah berlaku selama satu tahun tidak serta-merta memberi kepastian berusaha yang sesungguhnya.

Situasi ini menunjukkan bahwa UUCK ini hanya menjadi urgensi bagi para aktor penyusun dan jaringannya untuk melanggengkan bisnis mereka. Mengetahui aktor sentral dibalik UUCK menjadi dasar untuk mengetahui sesungguhnya siapa aktor yang memegang kendali atas jaringan oligarki. Visualisasi struktur relasional jaringan aktor dapat memberikan gambaran bahwa aktor-aktor yang kuat dalam jaringan oligarki ini yang berpotensi untuk mengendalikan arah pemanfaatan SDA di Indonesia kedepannya.

3.3.1 Atribut aktor dalam jaringan oligarki dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam

Aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan oligarki pemanfaatan SDA ini terdiri dari: 1) PEP yang terlibat dalam proses penyusunan UUCK dan memiliki perusahaan; 2) PEP yang tidak terlibat secara langsung dalam proses penyusunan UUCK, tetapi memiliki relasi dengan aktor lain yang terlibat dalam proses UUCK dan juga memiliki perusahaan; 3) Pengusaha (bukan PEP) yang ditunjuk/dilibatkan dalam proses penyusunan UUCK; dan 4) Pengusaha (bukan PEP) yang tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan UUCK tetapi memiliki relasi dengan aktor lain yang terlibat dalam proses UUCK. Lingkup Sumber Daya Alam yang dimaksud dalam studi ini adalah gabungan dari analisis dua sektor sebelumnya yaitu sektor tambang dan energi serta sektor perkebunan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 114 aktor yang berafiliasi dengan lebih dari 170 perusahaan dan 18 group perusahaan di sektor sumber daya alam (Gambar 17). Jumlah aktor yang merupakan anggota partai dan bukan anggota partai relatif seimbang, yaitu 60 aktor yang bukan anggota partai dan 54 aktor yang merupakan anggota partai. Aktor-aktor yang merupakan anggota partai tersebar di 12 partai politik dengan PDIP dan Golkar yang mendominasi. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa jaringan oligarki dalam pemanfaatan SDA ini memiliki proporsi yang seimbang antara pengusaha yang bukan anggota partai dan pengusaha yang menjadi anggota partai.



Gambar 17. Kategori aktor dalam jaringan oligarki berdasarkan keanggotaannya dalam partai

Apabila dikategorikan berdasarkan perannya dalam kursi pemerintahan, maka aktor dalam jaringan oligarki ini terdiri dari aktor yang memiliki jabatan fungsional (PEP) dan aktor yang tidak memiliki jabatan. Aktor yang memiliki jabatan fungsional adalah aktor-aktor yang pernah menduduki jabatan tersebut di masa lalu, aktor yang sedang menjalani jabatan tertentu, atau aktor yang tidak lagi menduduki jabatan tersebut karena terjerat kasus korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa jaringan oligarki didominasi oleh aktor yang memiliki jabatan fungsional (Gambar 18). Aktor yang memiliki jabatan fungsional sebanyak 73 aktor, sedangkan yang tidak memiliki jabatan fungsional hanya 35 aktor. Aktor yang memiliki jabatan fungsional tersebar ke dalam sembilan lembaga/jabatan dan

sebagian besar merupakan aktor yang memiliki kedudukan di DPR dan Kementerian. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pengusaha yang tidak terafiliasi dengan partai manapun tetapi ditunjuk/ dipilih menjadi pejabat publik.



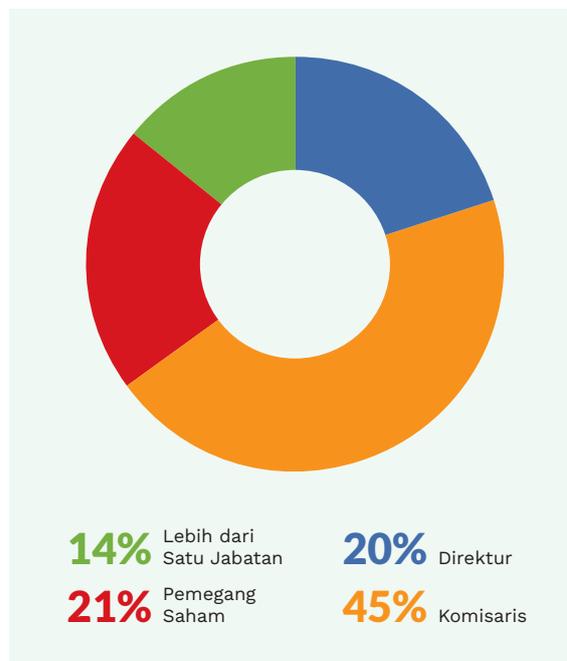


Gambar 18. Kategori aktor dalam jaringan oligarki berdasarkan jabatan fungsionalnya

Aktor yang bisa menjadi pemimpin di DPR adalah aktor yang berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak. Oleh karena itu, dominasi aktor yang memiliki jabatan di DPR berhubungan dengan jumlah partai PDIP dan Golkar yang juga mendominasi dalam jaringan ini. Aktor dari Kementerian yang terlibat dalam jaringan oligarki ini sebagian besar merupakan Menteri yang dipilih oleh Presiden. Idealnya terdapat sistem tertentu yang perlu dilakukan oleh Presiden untuk memilih seorang Menteri, tetapi faktanya aktor-aktor yang menduduki jabatan Menteri ini adalah pengusaha besar yang terafiliasi ke banyak perusahaan sumber daya alam.

Aktor dalam jaringan oligarki yang terafiliasi dengan perusahaan di sektor sumber daya alam sebagian besar merupakan komisaris (Gambar 19). Hasil ini jelas ditunjukkan dari dua analisis sebelumnya disektor tambang dan energi serta sektor perkebunan, yang mana jabatan komisaris juga mendominasi. Keberadaan komisaris dalam suatu perusahaan adalah menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan. Oleh karena itu, ketika para komisaris ini bisa menduduki

jabatan publik/PEP atau memiliki relasi dengan PEP tersebut maka mereka dapat melancarkan keberlangsungan usaha mereka terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik dan politik.



Gambar 19. Proporsi kedudukan aktor di dalam perusahaan di sektor SDA

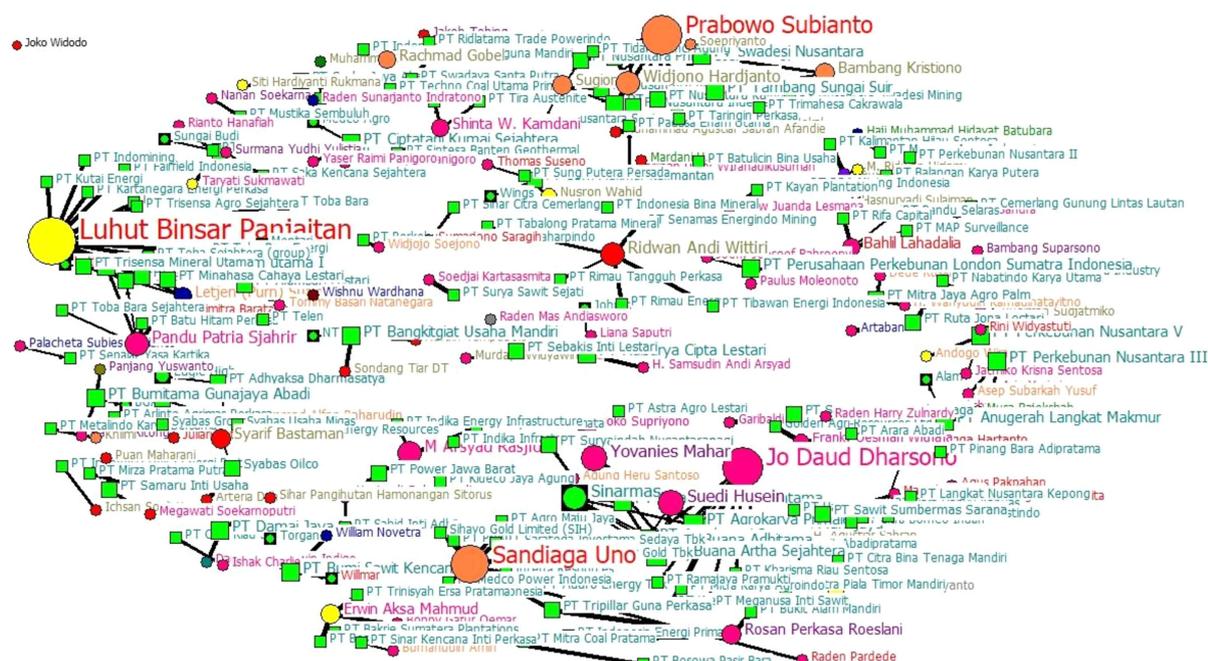


- Greenpeace Indonesia memasang instalasi gurita 'Monster Oligarki' di kolam Bundaran HI Jakarta. Para aktivis juga mendesak para calon presiden dan wakil presiden untuk berkomitmen serius dan konkrit, terkait keberpihakan pada rakyat serta melepaskan diri dari agenda oligarki. 06 Oktober 2023.

3.3.2 Aktor yang terafiliasi dengan perusahaan tambang, energi, dan perkebunan sawit

Hasil analisis SNA menunjukkan bahwa setiap aktor terhubung langsung dengan perusahaan di sektor sumber daya alam dan terdapat beberapa aktor yang saling terhubung di perusahaan yang sama. Selain itu, terdapat enam aktor yang memiliki perusahaan di sektor tambang dan energi serta sektor perkebunan sekaligus. Aktor tersebut antara lain Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno yang menjabat sebagai Menteri, Letjen (Purn) Suaidi yang pernah memiliki kedudukan di kesatuan TNI, serta Pandu Patria dan Bobby Gafur. Gambar 20 memberikan visualisasi hubungan antara aktor dengan perusahaan, serta menunjukkan beberapa aktor yang memiliki kedudukan di perusahaan yang sama.

Node yang berbentuk lingkaran mewakili aktor, node berbentuk lingkaran dalam bujur sangkar mewakili group, dan node berbentuk bujur sangkar mewakili perusahaan. Node dan label yang lebih besar mewakili aktor dengan jumlah koneksi yang lebih tinggi, baik itu koneksi ke perusahaan maupun dengan aktor lainnya dalam perusahaan yang sama. Warna pada node menunjukkan atribut partai dari masing-masing aktor, sehingga lingkaran dengan warna yang sama artinya aktor berasal dari partai yang sama. Warna pada label menunjukkan atribut jabatan fungsional dari masing-masing aktor, sehingga warna label yang sama artinya aktor tersebut memiliki jabatan yang sama. Ketebalan garis atau relasi menunjukkan bahwa semakin tebal garis maka semakin tinggi kedudukan seorang aktor dalam suatu perusahaan.



Gambar 20. Jaringan aktor dengan perusahaan di sektor sumber daya alam

Keterangan:

Bentuk node	Warna Node	Warna Label
○ Aktor	● PDI	● PPRN
□ Perusahaan	● Golkar	● Perindo
■ Group	● Non Partai	● Garnus
	● Gerindra	● Berkarya
	● Demokrat	● PKPI
	● PAN	● Perusahaannya/ Group
	● PKB	● Nasdem
		● Kementerian
		● TNI
		● Non jabatan
		● Kepolisian
		● Pemda
		● DPR
		● DPRD
		● Dubes
		● Perusahaan/ Group
		● Presiden

Tabel 9 menggambarkan aktor dengan nilai *degree* tertinggi, semakin tinggi nilai *degree* maka semakin banyak perusahaan yang dimilikinya dan semakin tinggi kedudukan aktor tersebut dalam perusahaan. Enam aktor sentral dalam usaha di sektor sumber daya alam merupakan PEP, sedangkan empat lainnya adalah pengusaha yang memiliki kedudukan penting di berbagai lembaga pengusaha. Sepuluh aktor dengan nilai *degree* tertinggi terdiri dari empat aktor (Luhut

Binsar, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Pandu Patria Sjahrir) yang memiliki perusahaan tambang, energi dan perkebunan, empat aktor (Rosan Perkasa, Erwin Aksa, Ridwan Andi, dan Widjono Hardjanto) hanya memiliki perusahaan tambang saja, dan dua aktor (Jo Daud Dharsono dan Yovianes Mahar) yang hanya memiliki perusahaan sawit saja.

Tabel 9. Aktor dengan nilai degree tertinggi dalam jaringan relasi aktor dengan perusahaan

Aktor	Degree
 Luhut Binsar Panjaitan	42.00
 Prabowo Subianto	34.00
 Sandiaga Uno	25.00
 Jo Daud Dharsono	22.00
 Rosan Perkasa Roeslani	16.00
 Erwin Aksa Mahmud	14.00
 Ridwan Andi Wittiri	12.00
 Widjono Hardjanto	12.00
 Yovianes Mahar	12.00
 Pandu Patria Sjahrir	10.00

Luhut Binsar Panjaitan merupakan PEP yang paling banyak memiliki perusahaan dan berkedudukan sebagai pemegang saham di seluruh perusahaan tersebut. Luhut terafiliasi dengan 14 perusahaan dengan rincian 11 perusahaan tambang dan energi dan 3 perkebunan sawit. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Luhut memiliki hubungan bisnis dengan keponakannya **Pandu Patria Sjahrir** dan sesama mantan anggota TNI Letjen (Purn) Suaidi (Gambar 21). Luhut juga terdaftar di dalam Pandora Papers karena menjabat di salah satu *shell company* yang berada di Panama [49].

Prabowo Subianto merupakan salah satu PEP dengan nilai *degree* tertinggi karena terhubung ke 11 perusahaan yang terdiri dari 10 perusahaan tambang dan energi dan 1 perkebunan sawit. Kedudukan Prabowo di perusahaan tersebut sebagian besar sebagai Pemegang saham sekaligus Komisaris. Prabowo merupakan aktor yang paling banyak terkoneksi dengan PEP lain di perusahaan yang sama. Empat PEP yang terkoneksi di perusahaan yang sama dengan Prabowo yaitu Sugiono, Bambang Kristiono, Mohamad Hekal, dan **Widjono Hardjanto**. Seluruh aktor yang terkoneksi dengan Prabowo tersebut berasal dari partai Gerindra dan memiliki jabatan publik di DPR.

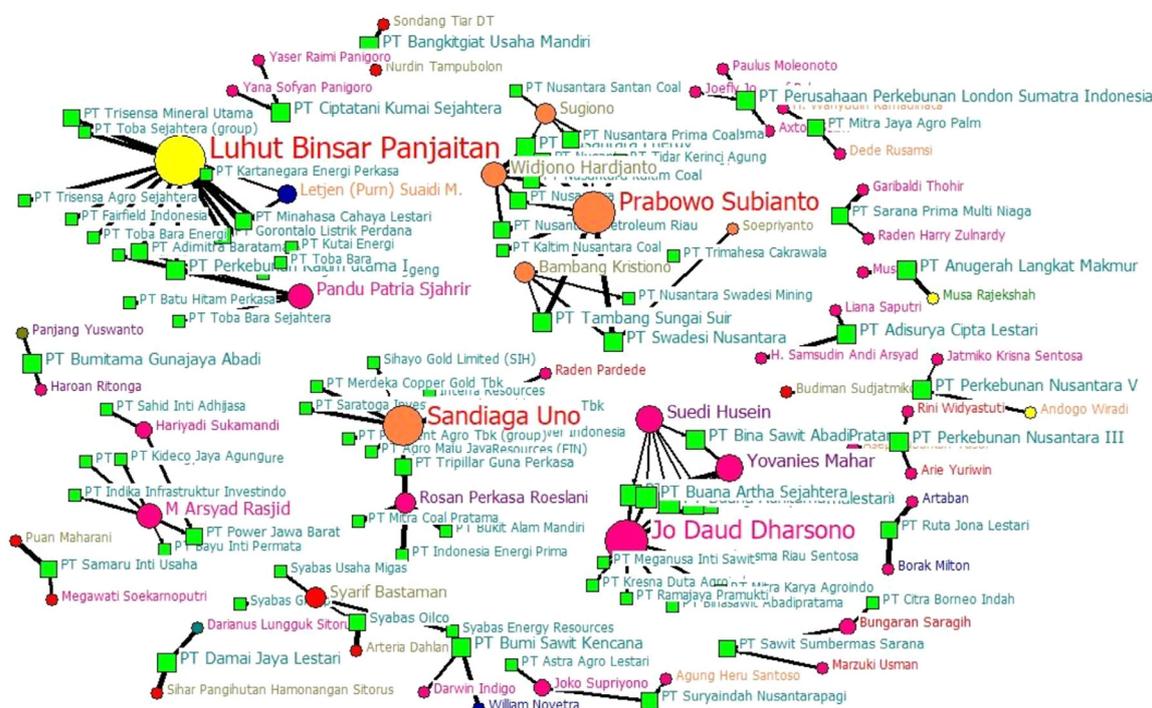
Sandiaga Uno merupakan PEP yang terhubung ke 10 perusahaan yang terdiri dari 7 perusahaan tambang dan energi, 2 perkebunan sawit, dan satu group perusahaan yang membawahi sektor tambang dan energi serta perkebunan. Kedudukan Sandiaga di perusahaan tersebut sebagian besar sebagai pemilik saham. Dua PEP yang terkoneksi di perusahaan yang sama dengan Sandiaga yaitu **Rosan Perkasa Roeslani** yang menjabat sebagai Duta Besar Amerika dan Raden Pardede yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan periode 2008-2010. Sandiaga dan Rosan merupakan tersebut juga tercatat sebagai mantan petinggi di KADIN [24].

Jo Daud Dharsono merupakan pengusaha yang sudah puluhan tahun menggeluti bisnis usaha sawit dan memiliki 11 perusahaan sawit yang terletak di dalam kawasan hutan. Sebagian besar

perusahaan tersebut berada di bawah naungan Sinarmas Group. Kedudukan Jo Daud di seluruh perusahaan sawit yang ada di dalam kawasan hutan tersebut sebagai Komisaris. Jo Daud terkoneksi dengan dua PEP lainnya di enam perusahaan yang sama, yaitu dengan Suedi Husein dan **Yovianes Mahar**.

Erwin Aksa Mahmud merupakan pengusaha yang terafiliasi dengan partai Golkar dan memiliki empat perusahaan tambang. Erwin Aksa menjabat sebagai pemegang saham di PT Bosowa Pasir Bara dan PT Bosowa Tambang Indonesia

dan menjabat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham di PT Bosowa Resources dan PT Trinisyah Ersas Pratama. **Ridwan Andi Wittiri** merupakan PEP yang memiliki lima perusahaan tambang. Kedudukan Ridwan Andi di lima perusahaan tersebut yaitu sebagai direktur di PT Rimau Tangguh Perkasa, komisaris di PT Tabalong Pratama Mineral, dan pemegang saham di tiga perusahaan lainnya. Erwin dan Ridwan merupakan aktor yang termasuk dalam aktor dengan *degree* tertinggi tetapi tidak memiliki hubungan dengan aktor lain di perusahaan yang sama.



Gambar 21. Aktor yang terhubung dengan aktor lain di perusahaan yang sama di sektor SDA

Hasil analisis hubungan antara aktor dengan perusahaan menunjukkan bahwa aktor-aktor sentral yang memiliki kedudukan penting di perusahaan pemanfaatan SDA **pasti memiliki koneksi politik** [12]. Tujuh dari 10 aktor yang paling banyak memiliki perusahaan merupakan PEP yang menjabat sebagai menteri, memiliki kedudukan di DPR dan Kepolisian. Selanjutnya, tiga aktor lainnya memiliki relasi dengan PEP. Jo Daud Dharsono dan Pandu Patria merupakan pengusaha yang tidak berafiliasi dengan partai manapun dan tidak memiliki jabatan publik,

tapi terkoneksi dengan PEP di perusahaan yang sama. Sedangkan Erwin Aksa merupakan pengusaha yang menduduki jabatan Wakil Ketua Umum di Partai Golkar juga terkoneksi dengan banyak PEP lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa bisnis dan politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan. Pengusaha akan membangun relasi dengan PEP atau menjadi PEP itu sendiri untuk kepentingannya. Begitu juga sebaliknya, sistem partai yang ada di Indonesia membutuhkan banyak suntikan dana dari para pengusaha [1].

3.3.3 Struktur relasional aktor dalam jaringan aktor pada pemanfaatan sumber daya alam

Dua analisis jaringan relasional aktor sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan karakteristik diantara jaringan aktor yang terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi (jaringan pertama) dan aktor yang terafiliasi dengan perkebunan kelapa sawit (jaringan kedua). Komposisi aktor pada jaringan yang pertama didominasi oleh PEP, sedangkan pada jaringan yang kedua didominasi oleh pengusaha yang tidak memiliki jabatan fungsional. Relasi aktor yang terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi menghasilkan jaringan yang masif dan terkonsolidasi dengan sangat baik, sedangkan relasi aktor yang terafiliasi dengan perkebunan sawit kurang terkonsolidasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena pada jaringan yang pertama setiap aktornya berelasi di berbagai konteks termasuk perumusan dan pengesahan Omnibus Law. Berbeda dengan jaringan kedua yang lebih fokus pada aktor-aktor yang memiliki perkebunan sawit di dalam kawasan hutan.

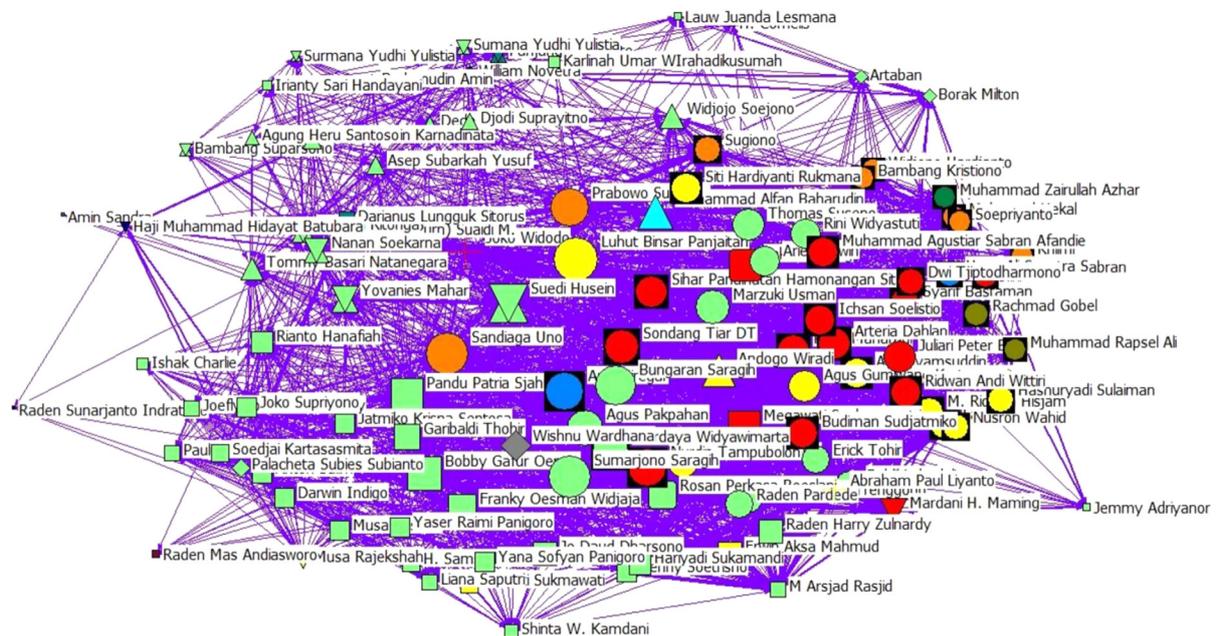
Berdasarkan dua jaringan sebelumnya, terbentuk jaringan relasional aktor yang lebih besar di sektor sumber daya alam. Hasil analisis menunjukkan jaringan relasi diantara aktor cukup masif, ditunjukkan dengan ribuan relasi yang terbentuk dengan jumlah aktor yang mencapai 114 orang. Akan tetapi, jaringan ini masih tidak lebih masif jika dibandingkan dengan jaringan yang pertama. Jaringan ini juga kurang terkonsolidasi dengan baik, sebagaimana tercermin dalam skor kepadatan yang relatif rendah. Angka kepadatan bergerak dari 0 hingga 1, dimana semakin mengarah ke 1 berarti semakin padat suatu jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% aktor yang ada di dalam jaringan saling berinteraksi satu sama lain.

Jaringan relasional ini juga tidak menunjukkan adanya struktur hierarkis dalam jaringan. Hal ini ditunjukkan dengan angka kedekatan yang lebih dari 0,5 dan ukuran diameter yang relatif rendah. Diameter adalah ukuran yang menunjukkan jarak terjauh di antara dua aktor supaya bisa berinteraksi. Suatu jaringan dengan diameter 3, artinya jarak terjauh (maksimal) aktor dalam jaringan bisa berinteraksi satu sama lain yaitu dengan diperantari oleh 3 aktor lain.

Tabel 10. Statistik deskriptif jaringan relasional aktor pada pemanfaatan sumber daya alam

Statistik deskriptif	Jaringan
Jumlah Aktor	114
Jumlah Relasi	5.616
Kepadatan Jaringan	0,436
Diameter	3
Kedekatan	0,67

Gambar 22 memberikan visualisasi hubungan tingkatan, yaitu ukuran yang menunjukkan aktor dengan jumlah relasi yang paling banyak dan paling kuat dibandingkan dengan aktor yang lainnya. Hubungan yang lebih kuat ditunjukkan dengan garis yang lebih tebal. Node dan label yang lebih besar mewakili aktor dengan jumlah koneksi yang lebih tinggi. Gambar 22 juga menyoroti aktor yang berasal dari partai yang sama memiliki warna node yang sama dan aktor dengan jabatan fungsional yang sama memiliki bentuk node yang sama.



Gambar 22. Sentralitas tingkatan dalam jaringan aktor pemanfaatan SDA

Keterangan:

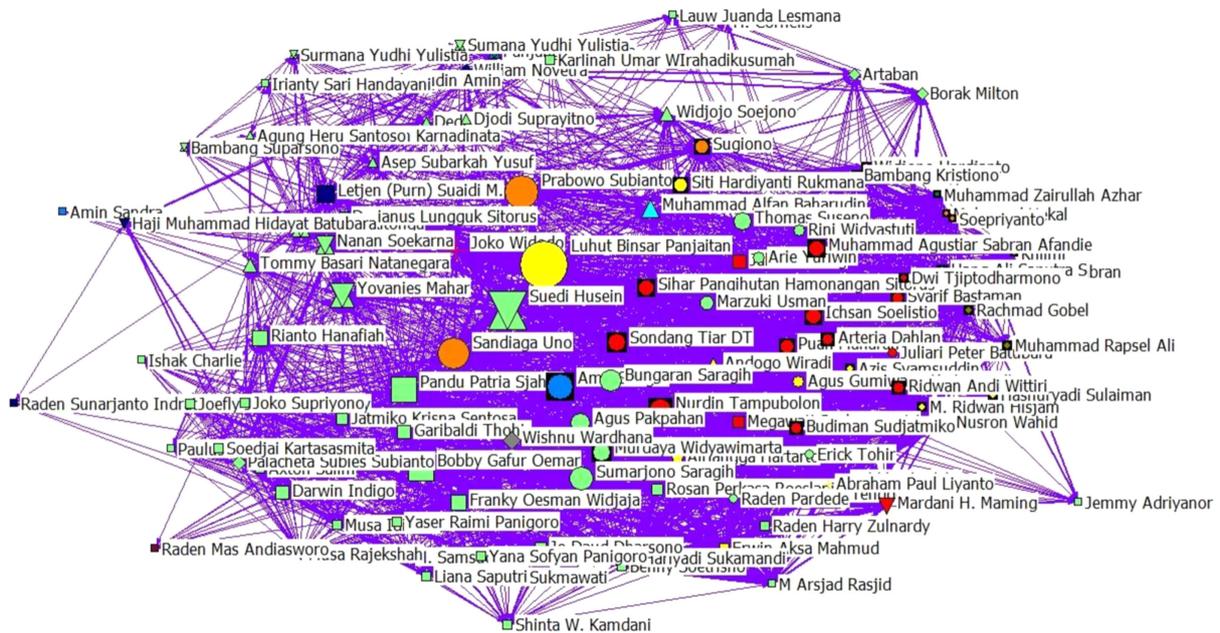
Warna Node		Bentuk Node	
● PDI	● PPRN	○ Menteri	▽ Pemda
● Golkar	● Perindo	□ Non jabatan	◇ DPRD
● Non Partai	● Garnus	○ Dubes	□ DPR
● Gerindra	● PKPI	△ TNI	⊠ Kepolisian
● Demokrat	● Berkarya	+ Presiden	◇ DPD
● PAN	● PKB		

Struktur jaringan relasi aktor dalam sektor SDA sama dengan dua jaringan yang sebelumnya, dimana aktor yang kuat terletak di pusat struktur jaringan dan aktor yang berasal dari partai yang sama cenderung memiliki jarak yang dekat satu sama lain. Hal yang menarik adalah pengusaha yang tidak terafiliasi dengan partai politik menyebar ke seluruh jaringan dan banyak diantaranya merupakan PEP dengan posisi struktural yang strategis. Pengusaha yang tidak terafiliasi dengan partai politik paling banyak memiliki kedudukan sebagai Menteri (pernah atau sedang menjabat). Menteri adalah jabatan

publik yang dipilih langsung oleh Presiden, jabatan ini yang paling memungkinkan bagi pengusaha agar dapat memengaruhi kebijakan publik yang akan memengaruhi keberlangsungan usahanya. Aktor-aktor yang memiliki jabatan sama juga cenderung memiliki kedekatan hubungan, kecuali TNI dan polisi yang cenderung menyebar. PEP yang memiliki kedudukan di DPR dan Kementerian memiliki kedekatan secara struktural ditunjukkan dengan berkumpulnya node-node aktor tersebut dibagian kanan jaringan.

Gambar 23 memberikan visualisasi hubungan keperantaraan, yaitu ukuran yang menunjukkan aktor dalam menjalankan perannya sebagai perantara antara satu aktor dengan aktor yang lainnya. Berdasarkan analisis tingkatan dan keperantaraan maka **Luhut Binsar Panjaitan** menjadi aktor sentral karena banyaknya relasi dan perannya sebagai penghubung diantara jenis aktor yang berbeda. Berdasarkan dua analisis sebelumnya, Luhut merupakan aktor populer dan menjadi perantara di jaringan sektor tambang dan energi serta jaringan sektor perkebunan. Oleh

karena itu, hasil analisis di jaringan pemanfaatan SDA yang mencakup kedua sektor tersebut juga menunjukkan bahwa Luhut adalah aktor sentral. Posisinya yang strategis di dalam jaringan menjadikan Luhut sangat berpotensi untuk menyebarkan informasi dan memengaruhi aktor lain dalam jaringan karena dapat menjangkau sejumlah besar aktor dan arus informasi di seluruh jaringan. Selain itu, Luhut dapat mengontrol arus informasi, serta memperluas jaringan oligarki di sektor SDA.

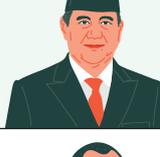


Gambar 23. Sentralitas keperantaraan dalam jaringan aktor pemanfaatan SDA



Greenpeace Indonesia memasang instalasi gurita 'Monster Oligarki' di kolam Bundaran HI Jakarta. Greenpeace Indonesia mengajak masyarakat untuk mewaspadaai oligarki yang membayangi para kandidat pemilu, untuk bersama menyerukan pemilu tanpa oligarki, memilih bumi lestari, bukan oligarki. 06 Oktober 2023.

Tabel 11. Aktor dengan derajat tingkatan tertinggi dalam jaringan aktor pemanfaatan SDA

Aktor	Degree
 Luhut Binsar Panjaitan	141.00
 Sandiaga Uno	132.00
 Puan Maharani	118.00
 Airlangga Hartarto	112.00
 Bobby Gafur Oemar	109.00
 Megawati Soekarnoputri	109.00
 Sumarjono Saragih	108.00
 Rosan Perkasa Roeslani	107.00
 Prabowo Subianto	105.00
 Pandu Patria Sjahrir	103.00

Luhut dapat menjadi aktor sentral karena terdapat beberapa faktor. Pertama, luhut merupakan kader partai Golkar yang mana partai Golkar merupakan salah satu partai yang memperoleh kursi terbanyak di pemerintahan. Kedua, Luhut terkoneksi dengan keponakannya yang juga memiliki banyak relasi dengan pengusaha lain yaitu **Pandu Patria Sjahrir**. Pandu merupakan pengusaha yang pernah memiliki jabatan penting di KADIN [24] dan APBI-ICMA [46], serta terlibat langsung sebagai Satgas Omnibus Law [23]. Ketiga, latar belakang Luhut yang merupakan anggota TNI, yang mana TNI termasuk aktor yang mendominasi dalam jaringan ini. Pada masa lampau, militer merupakan kelompok aktor yang berada di lingkaran Presiden Soeharto. Mereka menerima keistimewaan dengan memperoleh izin pengusahaan di bidang sumber daya alam [50] dan meleburnya domain pengusaha dengan militer [51]. Keempat, Luhut menjadi salah satu politikus yang pernah menduduki banyak jabatan terutama di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf [18]. Kelima, Luhut memiliki banyak perusahaan terutama di sektor tambang dan banyak terkoneksi dengan PEP lainnya di perusahaan yang dimilikinya.

PEP berikutnya yang memiliki nilai tingkatan dan nilai keperantaraan tertinggi adalah **Sandiaga Uno**. Sandiaga Uno dapat menjadi aktor sentral karena beberapa faktor. Pertama, Sandiaga merupakan pengusaha sukses di Indonesia yang memiliki banyak perusahaan di sektor SDA dan berelasi dengan pengusaha lainnya di perusahaan yang dimilikinya. Salah satu aktor populer di jaringan oligarki yang berelasi dengan Sandiaga di perusahaan yang sama adalah **Rosan Perkasa Roeslani** yang saat ini menjadi Duta Besar Amerika Serikat. Kedua, Sandiaga Uno merupakan Mantan Wakil Ketua di KADIN [24]. Banyak pengusaha di jaringan oligarki ini yang tergabung di KADIN dan diantara pengusaha tersebut banyak yang menjadi pejabat dan terlibat langsung dalam Omnibus Law. Ketiga, Sandiaga Uno yang merupakan kader partai Gerindra menjadi politikus yang menduduki jabatan penting. Sandiaga pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, maju dalam Pilpres bersama dengan Prabowo, hingga sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [30].

Puan Maharani menjadi salah satu aktor perantara dan aktor populer dalam jaringan oligarki, berikut beberapa faktor yang menyebabkan Puan menjadi salah satu aktor sentral. Pertama, Puan merupakan kader partai PDIP yang memperoleh kursi terbanyak di masa pemerintahan saat ini. Kedua, Puan pernah menduduki beberapa jabatan politik seperti Ketua Fraksi PDI DPR RI, Menteri Koordinator PMK RI, dan saat ini menjadi Ketua DPR [17]. Jabatannya sebagai Ketua DPR merupakan posisi yang sangat strategis karena Puan memiliki kewenangan dalam merumuskan anggaran belanja negara dan produk kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, Puan banyak terhubung dengan PEP maupun aktor lain yang memiliki kepentingan politis. Ketiga, keterlibatannya dalam perumusan dan pengesahan Omnibus Law [32]. Proses penyusunan Omnibus Law melibatkan banyak pengusaha baik itu yang memiliki jabatan publik maupun tidak.

Prabowo Subianto merupakan aktor yang banyak memiliki perusahaan di sektor tambang dan energi, berikut beberapa faktor yang menyebabkan Prabowo aktor yang populer dan berperan sebagai perantara. Pertama, Prabowo memiliki latar belakang TNI sama dengan Luhut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kekuatan militer dalam pemanfaatan SDA sudah terjadi sejak jaman Soeharto dan Prabowo termasuk salah satu aktor yang memiliki kedekatan relasi dengan Soeharto [52]. Kedua, Prabowo memiliki banyak relasi dengan PEP lain di perusahaan yang dimilikinya dan sebagian besar aktor yang memiliki relasi bisnis dengan Prabowo adalah PEP yang merupakan kader partai Gerindra. Keempat, *track record* Prabowo yang terjun ke dunia politik dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan membuatnya banyak terkoneksi dengan aktor lain dalam jaringan oligarki ini.

Sumarjono Saragih merupakan salah satu aktor non-PEP yang menjadi aktor sentral dalam jaringan ini. Hal ini disebabkan karena Sumarjono saat ini aktif menjabat di berbagai organisasi bisnis dan pengusaha seperti GAPKI [53], APINDO [38], dan KADIN [39]. Sumarjono juga pernah menjadi relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf [54] yang memberikan peluang baginya untuk memiliki koneksi dengan PEP lainnya.

Bobby Gafur Oemar juga merupakan aktor non-PEP yang menjadi aktor sentral karena pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di KADIN [41]. Bobby juga menjadi deklarator dalam pengusaha pendukung Jokowi pada pemilu 2019 sehingga banyak memiliki relasi dengan aktor lain dari partai PDIP. Bobby juga menjadi salah satu pengusaha yang menjadi Satgas Omnibus Law bersama dengan Pandu [23].

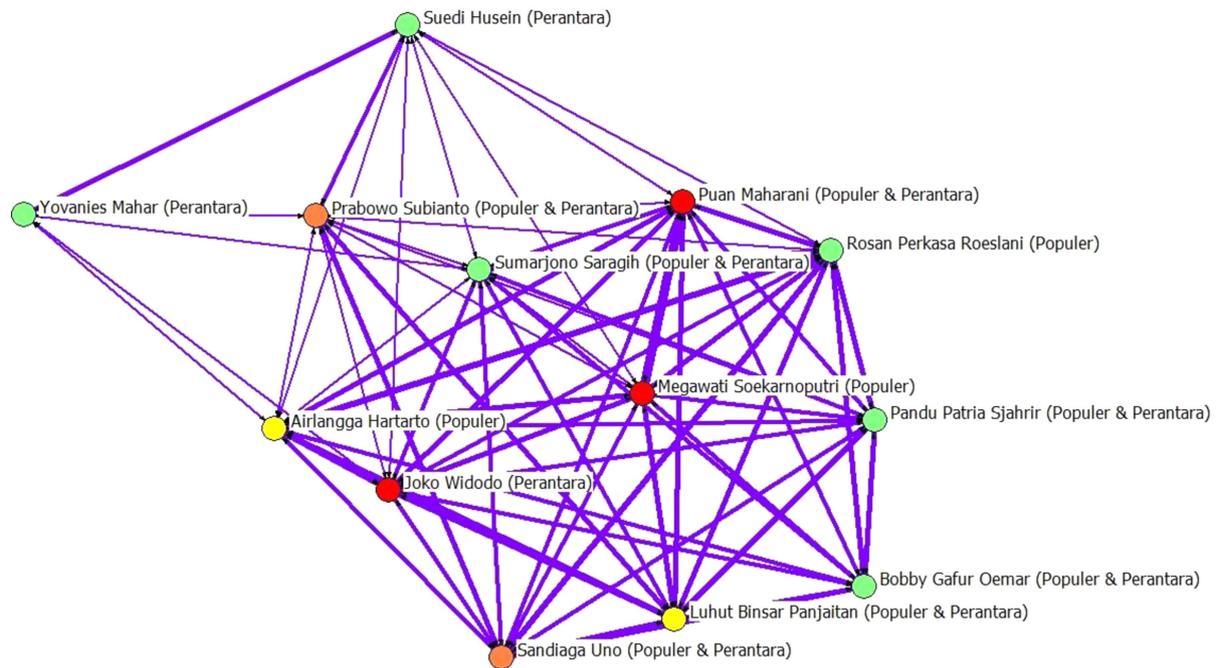
Megawati Soekarnoputri menjadi aktor yang memiliki banyak relasi di jaringan oligarki ini karena beberapa faktor. Pertama, partai yang dipimpinya memperoleh suara terbanyak di masa pemerintahan sekarang. Kedua, Megawati dapat menyalurkan kepentingannya melalui anaknya Puan Maharani yang merupakan salah satu aktor sentral di jaringan oligarki dan juga Jokowi selaku kader dari partai PDI [32]. **Joko Widodo** juga termasuk dalam salah satu aktor yang berperan sebagai perantara meskipun nilai keberantaraannya tidak setinggi PEP yang lainnya. Jabatan Jokowi sebagai presiden menjadikannya terhubung dengan berbagai aktor dengan berbagai kepentingan. Pada masa pemerintahannya, Jokowi banyak melakukan *reshuffle* kabinet dan banyak pengusaha yang mengisi jabatan Menteri. Selain itu, Jokowi juga melibatkan pengusaha yang mendukungnya dalam Pilpres dalam proses perumusan Omnibus Law.

Tabel 12. Aktor dengan derajat keperantaraan tertinggi dalam jaringan aktor pemanfaatan SDA

Aktor	Betweenness
 Luhut Binsar Panjaitan	231.48
 Suedi Husein	178.26
 Prabowo Subianto	150.41
 Sandiaga Uno	135.41
 Puan Maharani	115.04
 Bobby Gafur Oemar	108.83
 Pandu Patria Sjahrir	99.22
 Sumarjono Saragih	98.05
 Joko Widodo	91.51
 Yovianes Mahar	89.75

Suedi Husein dan **Yovianes Mahar** merupakan anggota kepolisian yang menjadi aktor sentral dalam jaringan oligarki. Suedi Husein menjadi aktor yang berperan sebagai perantara dan Yovianes Mahar menjadi aktor perantara sekaligus aktor yang memiliki banyak koneksi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kedua aktor tersebut menjadi aktor sentral. Pertama, kedua anggota polisi ini memiliki banyak perusahaan perkebunan sawit di bawah group besar Sinarmas. Suedi dan Yovianes juga terhubung dengan pengusaha Jo Daud Dharsono di enam perkebunan sawit yang sama. Kedua, meskipun mereka tidak berafiliasi dengan partai dan tidak tergabung dengan institusi manapun, tetapi mereka memiliki latar belakang di Kepolisian. Pada masa lampau, polisi juga merupakan kelompok aktor yang dekat dengan Presiden karena proses *land grab* untuk pemanfaatan SDA memperoleh dukungan penuh dari polisi [55].

Airlangga Hartarto merupakan PEP yang banyak memiliki relasi dengan aktor lain karena beberapa faktor. Pertama, Airlangga merupakan Ketua Umum partai Golkar yang mana partai tersebut menjadi partai yang mendominasi dalam jaringan oligarki setelah PDIP. Kedua, Airlangga pernah menjabat di berbagai organisasi dan di kursi pemerintahan yaitu di DPR dan Menteri [56]. Ketiga, Airlangga memiliki banyak perusahaan di sektor tambang dan energi bersama dengan pengusaha lainnya. Keempat, Airlangga menjadi pembentuk dan pengarah Satgas Omnibus Law [23]. Kelima, Airlangga juga menjadi Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf pada tahun 2019 [26].



Gambar 24. Jaringan aktor dengan nilai tingkatan dan atau keperantaraan tertinggi pada pemanfaatan SDA

Gambar 24 menyajikan informasi aktor sentral dalam jaringan oligarki di sektor sumber daya alam. Aktor-aktor yang kuat ini didominasi dari kalangan PEP dan paling banyak menjabat sebagai Menteri. Apabila berdasarkan partai, aktor yang kuat justru didominasi oleh aktor yang tidak terafiliasi dengan partai manapun dan selanjutnya diikuti oleh partai PDI. Aktor yang terlibat dalam jaringan oligarki di sektor sumber daya alam merupakan aktor-aktor yang mempunyai *track record* yang panjang di kursi pemerintahan. Sebagian besar dari mereka pernah menjabat di berbagai posisi dalam jabatan publik bahkan semenjak zaman Soeharto. Para pengusaha besar banyak diberi kesempatan untuk masuk ke dalam dunia politik dengan menjabat sebagai Menteri [57], karena posisi itu sangat bergantung dari relasi yang terbentuk antara para pengusaha tersebut dengan Presiden.

Aktor yang terlibat langsung dalam perumusan dan pengesahan Omnibus Law sebagian besar merupakan pengusaha di sektor tambang dan energi. Meskipun berbagai negara sudah mulai beralih ke bioenergi dan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sumber daya potensial yang bisa dijadikan bioenergi di Indonesia, tetapi sektor tambang khususnya batubara masih menjadi sumber energi utama di Indonesia [58]. Secara politis, berbagai sektor masih diarahkan untuk bergantung kepada sumber energi batubara. Selain tekanan internal, penggunaan energi kotor di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi politik dunia. Bank Dunia yang memiliki 'tujuan resmi' untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun kemakmuran bersama, faktanya banyak menggelontorkan dana untuk pembiayaan proyek bahan bakar fosil dan pembangkit listrik tenaga batu bara [59].

Pada sektor perkebunan sawit, dominasi TNI dan banyaknya aktor dari Kepolisian yang memiliki perkebunan sawit di dalam kawasan hutan merupakan hasil dari kebijakan masa lalu [60]. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada masa Soeharto militer dan polisi diberi kekuasaan penuh untuk mengontrol pemanfaatan SDA terutama di sektor kehutanan, sehingga banyak dari prajurit TNI/Polri memiliki konsesi HPH [50]. Ketika masa kejayaan HPH mulai menurun dan meningkatnya permintaan kelapa sawit, maka konversi lahan termasuk hutan terjadi secara besar-besaran [61]. Kondisi tata kelola lahan yang tidak jelas menyebabkan areal ex-HPH yang ada di dalam kawasan hutan dikonversi ke perkebunan kelapa sawit. Peristiwa masa lalu tersebut yang kemudian menyebabkan banyak anggota TNI dan Polisi memiliki perkebunan sawit di dalam kawasan hutan.

Jaringan oligarki yang menunjukkan hubungan kuat antara pengusaha dan PEP sangat berpotensi untuk terus tumbuh menjadi jaringan yang lebih besar karena sebagian besar aktor sentral yang ada di jaringan ini juga merupakan “produk” jaringan oligarki di masa lalu. Oligarki tidak pernah tergusur oleh reformasi, bahkan mampu beradaptasi dengan demokrasi dan reformasi *good governance* [62]. Pasca Orde Baru, Indonesia bergerak ke arah oligarki *ruling*, yakni koalisi beberapa oligarki untuk berbagi kekuasaan dan berbagi akses pada sumber daya [63]. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya relasi yang kuat antara pengusaha dengan PEP dan bahkan pengusaha menjadi PEP itu sendiri, sehingga mereka dapat menjadikan negara sebagai alat untuk memenuhi kepentingan usaha mereka.

■ Greenpeace Indonesia memasang instalasi gurita ‘Monster Oligarki’ di kolam Bundaran HI Jakarta. Tentakel-tentakel ‘Monster Oligarki’ menggenggam tiga boneka peraga, serupa figure-figur politik yang maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024. 06 Oktober 2023.

© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace



04.

Kesimpulan

Studi analisis jaringan sosial terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses Omnibus Law sekaligus aktor yang terafiliasi di perusahaan tambang, energi dan perkebunan kelapa sawit menghasilkan beberapa temuan utama, yaitu:

1. Terdapat relasi yang kuat diantara para aktor yang memiliki perusahaan tambang dan aktor yang terlibat dalam proses Omnibus Law, sehingga jaringan oligarki yang terbentuk bersifat masif dan terkonsolidasi dengan baik.
2. Secara keseluruhan, aktor dalam jaringan oligarki yang tidak terafiliasi dengan partai dan aktor yang terafiliasi dengan partai memiliki proporsi yang seimbang. Pada kategori aktor yang terafiliasi dengan partai, kader partai PDI-P dan Golkar yang paling mendominasi.
3. Sebagian besar aktor dalam jaringan oligarki menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang terhubung ke aktor-aktor tersebut. Komisaris memiliki peranan penting dalam mengendalikan dan mengawasi kinerja dari perusahaan, menjaga kepentingan pemegang saham, dan menentukan strategi dan pengambilan keputusan perusahaan.
4. Sebagian besar PEP yang terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi merupakan mantan anggota maupun anggota DPR yang masih aktif, sedangkan PEP yang terafiliasi dengan perkebunan sawit dalam kawasan hutan berasal dari TNI.
5. Luhut Binsar Panjaitan merupakan aktor yang paling banyak terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi, sedangkan Jo Daud Dharsono merupakan aktor yang paling banyak terafiliasi dengan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan.
6. Luhut Binsar Panjaitan menjadi aktor sentral dalam jaringan oligarki karena memiliki banyak relasi dengan aktor dalam jaringan (*degree centrality*) dan paling banyak berperan sebagai perantara diantara berbagai jenis aktor (*betweenness centrality*). Posisi strategisnya dalam jaringan sangat berpotensi untuk mengontrol aliran sumber daya baik untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya dan memperkuat dan memperluas jaringan oligarki yang sudah ada.
7. Jaringan oligarki dalam sistem pemerintahan di Indonesia terus dipertahankan dan mengalami regenerasi sejak zaman Orde Baru hingga saat ini. Apabila pada era Orde Baru oligarki cenderung bersifat sentralistik, sedangkan pada era Reformasi jaringan oligarki lebih banyak melibatkan aktor di tingkat pusat hingga daerah.
8. Jaringan oligarki yang identik dengan penguasa-pengusaha ini akan terus bertahan selama pengusaha membutuhkan politik untuk menyelamatkan dan mengembangkan usaha mereka, dan partai politik atau calon pemimpin membutuhkan peran pengusaha terkait dengan berbagai pendanaan.

Referensi

- [1] Azhar, M. A. Relasi Pengusaha-Penguasa dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha Menjadi Penguasa. *J. Publica*, 2012, 2 (1), 43–55.
- [2] Ananta, D. D. Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *J. Polit.*, 2017, 2 (1), 101. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83>.
- [3] Firmansyah, A. T.; Sinaga, E. S.; Aisyah, F. A. Korporatokrasi RUU Omnibus Law. *J. Huk.*, 2020, 3, 131–140.
- [4] Borgatti, S. P.; Everett, M. G.; Johnson, J. C. *Analyzing Social Networks*; Saeman, J., Ed.; SAGE Publications Ltd: London, 2013.
- [5] Laumann, E. O.; Marsden, P. V; Prensky, D. The Boundary Specification Problem in Network Analysis. In *Research Methods in Social Network Analysis*; Freeman, L. C., White, D. R., Romney, A. K., Eds.; Transaction Publishers, 1983; p 530.
- [6] Bersihkan Indonesia. *Para Pebisnis Tambang & Energi Kotor di Balik Omnibus Law: Peran, Konflik Kepentingan, & Rekam Jejaknya*; 2020.
- [7] Eriyanto. *Analisis Jaringan Komunikasi*; Prenadamedia Group: Jakarta, 2014.
- [8] Freeman, L. C. Centrality in Social Networks Conceptual Clarification. *Soc. Networks*, 1978, 1 (1968), 215–239.
- [9] Granovetter, M. The Strength of Weak Ties : A Network Theory Revisited. *Sociol. Theory*, 1983, 1 (1983), 201–233.
- [10] Borgatti, S. P.; Everett, M. G.; Freeman, L. C. *Ucinet 6 for Windows: Software for Social Network Analysis*. Analytic Technologies: Harvard, MA 2002.
- [11] Borgatti, S. P. *Netdraw Network Visualization*. Analytic Technologies: Harvard, MA 2002.
- [12] Kristanto, A. T. R. I. Pengaruh Political Connections. *EXERO J. Res. Bus. Econ.*, 2019, 02 (01), 1–21.
- [13] Ali, M. Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi (Dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik di Indonesia). *JiAP (Jurnal Ilmu Adm. Publik)*, 2019, 6 (1), 56. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i1.666>.
- [14] Agrawal, A.; Knoeber, C. R. Do Some Outside Directors Play a Political Role. *J. Law Econ.*, 2001, XLIV, 1–21.
- [15] Jatam Greenpeace ICW Auriga. Shedding Light on Political Corruption in Indonesia 's Coal Mining Sector Table of Contents Table of Figures. *Greenpeace*, 2018.
- [16] Setiawan, E. Profil Syarif Bastaman <https://www.merdeka.com/syarif-bastaman/profil/>.
- [17] Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Profil Anggota DPR RI <https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/1636>.

- [18] Susanti, I.; Muhammad, A. 10 Jabatan Luhut Selama Pemerintahan Jokowi <https://ekbis.sindonews.com/read/563672/34/10-jabatan-luhut-selama-pemerintahan-jokowi-yang-terakhir-baru-dijabat-4-hari-1633752621>.
- [19] Adyatama, E.; Wibowo, E. Jokowi Lantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN <https://nasional.tempo.co/read/1516830/jokowi-lantik-megawati-sebagai-ketua-dewan-pengarah-brin/full&view=ok>.
- [20] Jannah, S. Bayang-bayang Megawati di Pemerintahan Jokowi Usai Kongres PDIP <https://tirto.id/bayang-bayang-megawati-di-pemerintahan-jokowi-usai-kongres-pdip-egb9>.
- [21] DA, A. T. Tiga Indikasi State Capture dalam RUU Cipta Kerja <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f50df6369af9/tiga-indikasi-state-capture-corruption-dalam-ruu-cipta-kerja/>.
- [22] Audinovic, V. Profil Rosan Perkasa Roeslani <https://www.merdeka.com/rosan-roeslani/profil/>.
- [23] JATAM. *Para Aktor di Balik Omnibus Law*; Jakarta, 2020.
- [24] KADIN. Sejarah KADIN Indonesia <https://kadin.id/tentang-kami/sejarah>.
- [25] Wikipedia. Mardani H. Maming https://id.wikipedia.org/wiki/Mardani_H._Maming.
- [26] Mashabi, S. Ini Susunan Lengkap Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3639873/ini-susunan-lengkap-tim-kampanye-nasional-jokowi-maruf>.
- [27] Wikipedia. Juliari Batubara https://id.wikipedia.org/wiki/Juliari_Batubara.
- [28] Erianto, D. Tokoh Juliari Peter Batubara <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/juliari-batubara>.
- [29] Juniyanti, L.; Purnomo, H.; Kartodihardjo, H.; Prasetyo, L. B.; Suryadi; Pambudi, E. Powerful Actors and Their Networks in Land Use Contestation for Oil Palm and Industrial Tree Plantations in Riau. *For. Policy Econ.*, 2021, 129 (April), 102512. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102512>.
- [30] Sulistiowati, T. Profil Sandiaga Uno, dari pengusaha sampai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <https://nasional.kontan.co.id/news/profil-sandiaga-uno-dari-pengusaha-sampai-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif>.
- [31] Kartasasmita, A. AGK “Ketulusan dalam Pengabdian” <https://agusgumiwang.com/profil-agus-gumiwang-kartasasmita/>.
- [32] Nathaniel, F. Jokowi dan Puan Maharani: Duet Maut PDIP dalam Pengesahan Omnibus Law <https://tirto.id/jokowi-puan-maharani-duet-maut-pdip-dalam-pengesahan-omnibus-law-f5P5>.
- [33] Nurhasim, M. Dilema Menata Bisnis TNI <http://lipi.go.id/berita/dilema-menata-bisnis-tni/2536>.
- [34] Muntoro, R. K. Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif. *Artik. Lemb. Manag. Fak. Ekon. Univ. Indones.*, 2006, 1–18.
- [35] Mutuagung Lestari. *Roundtable on Sustainable Palm Oil Certification RSPO*; 2019.
- [36] Matanasi, P. Dalam Sejarah, TNI Tidak Pernah Benar-Benar Netral Politik <https://tirto.id/dalam-sejarah-tni-ad-tak-pernah-benar-benar-netral-politik-daAy>.
- [37] Wikipedia. Nurdin Tampubolon https://id.wikipedia.org/wiki/Nurdin_Tampubolon.
- [38] APINDO. *UU Cipta Kerja Untuk Mendorong Investasi Dan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi*; Jakarta, 2020.
- [39] Kadin Sumsel. Kadin SumSel <http://www.kadin-sumsel.or.id/Profil/DewanPengurus>.
- [40] GAPKI. GAPKI dan JAPBUSI Berkomitmen Kuat Tingkatkan Kesejahteraan Petani <https://gapki.id/news/14768/gapki-japbusi-berkomitmen-kuat-tingkatkan-kesejahteraan-petani-sawit>.
- [41] KADIN. Kadinpedia: Bobby Gafur Umar <https://www.kadin.id/kadinpedia/9/bobby-gafur-umar>.
- [42] Peoplepill. About Suedi Husein <https://peoplepill.com/people/suedi-husein>.
- [43] Idham, K. Mutasi Polri, 5 Kapolda Diganti <https://news.detik.com/berita/d-3477677/mutasi-polri-5-kapolda-diganti>.

- [44] Wikipedia. Nanan Soekarna https://id.wikipedia.org/wiki/Nanan_Soekarna.
- [45] IMI. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) <http://imi.co.id/imi/ketua-umum>.
- [46] APBI-ICMA. Pandu Sjahrir Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum APBI-ICMA Periode 2021-2024 <http://www.apbi-icma.org/en/news/4886/pandu-sjahrir-kembali-terpilih-sebagai-ketua-umum-apbi-icma-periode-2021-2024>.
- [47] Indonesian Center for Environmental Law. Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Dan Sumber Daya Alam. *Indones. Cent. Environ. Law*, 2020, 107.
- [48] Kartidihardjo, H. Mengapa UU Cipta Kerja Belum Mendongkrak Investasi <https://www.forestdigest.com/detail/1383/investasi-uu-cipta-kerja>.
- [49] CNN Indonesia. Masuk Laporan Skandal Pajak Pandora Papers, Luhut Buka Suara <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211004140102-532-703110/masuk-laporan-skandal-pajak-pandora-papers-luhut-buka-suara>.
- [50] Casson, A.; Obidzinski, K. From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of 'Illegal' Logging in Kalimantan, Indonesia. *World Dev.*, 2002, 30 (12), 2133–2151.
- [51] Poffenberger, M. Rethinking Indonesia Forest Policy: Beyond The Timber Barons. *Asian Survei*, 1997, 37 (5), 453–469.
- [52] Djarot, E. Prabowo Sang Kontroversi: *Kisah Penculikan, Isu Kudeta dan Tumbangnya Seorang Bintang*; Penerbit Agromedia Pustaka: Jakarta, 2006.
- [53] GAPKI. Struktur Kepengurusan GAPKI <https://gapki.id/struktur-kepengurusan>.
- [54] Sindonews.com. 16 Juta Buruh Sawit Digarap untuk Jokowi: #sawitIJO <https://daerah.sindonews.com/berita/1392137/190/16-juta-buruh-sawit-digarap-untuk-jokowi-sawitijo>.
- [55] Obidzinski, K.; Chaudhury, M. Transition to Timber Plantation Based Forestry in Indonesia : Towards a Feasible New Policy. *Int. For. Rev.*, 2009, 11 (1), 79–87.
- [56] Partai Golongan Karya. Profil Airlangga Hartarto <https://www.partaigolkar.com/airlangga-hartarto/>.
- [57] Nathaniel, F. Jokowi Perlahan-Lahan Membawa Indonesia Menuju Negara Plutokrasi <https://tirto.id/jokowi-perlahan-lahan-membawa-indonesia-menuju-negara-plutokrasi-f9gx>.
- [58] Silalahi, S. A. F.; Saragih, J. P. Kebijakan Pendukung Batubara Sebagai Komponen Diversifikasi Energi Tahun 2025. *Ekon. Kebijak. Publik*, 2010, 1 (1), 25–46.
- [59] Hess, J. Working at the World Bank, I can see how it is failing humanity on the climate crisis <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/28/world-bank-failing-humanity-climate-crisis-fossil-fuels-cop26>.
- [60] Prastiti, O.; Alexander, M. Dwifungsi dan Transformasi Bisnis Militer Pasca Reformasi <https://www.balairungpress.com/2018/11/dwifungsi-dan-transformasi-bisnis-militer-pasca-reformasi/>.
- [61] Gatto, M.; Wollni, M.; Qaim, M. Land Use Policy Oil Palm Boom and Land-Use Dynamics in Indonesia : The Role of Policies and Socioeconomic Factors. *Land use policy*, 2015, 46, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.03.001>.
- [62] Widoyoko, J. D. Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi : Catatan Untuk Gerakan Anti Korupsi. *Integritas*, 2016, 2 (1), 269–297.
- [63] Winters, J. Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia*, 2013, 96, 11–33.

GREENPEACE

Dipublikasikan oleh Greenpeace
Indonesia.

Greenpeace dalam laporan ini
direferensikan kepada Greenpeace
Indonesia kecuali dinyatakan lain.

Greenpeace Indonesia
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 19
RT 1/RW 1 Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat 10350
t: 021 314 8521
e: info.id@greenpeace.org
w: www.greenpeace.or.id